

MAJALAH FILSAFAT

DRIPARKARA

ISSN 0126-0243.

Th. XVIII No. 4



TEORI KRITIS HABERMAS SEBUAH ALTERNATIF

- **Proyek Sosio Epistemologis Habermas**
Julius Widiyagore
- **Teknologi dan Sains sebagai "Ideologi"**
A. Widyanegara
- **Arti Kritis Dewasa Ini**
Josephus Edi Mulvono
- **Teknologisasi di Indonesia**
Tim Redaksi



cover: ruby

DRIYARKARA

majalah filsafat
sekolah tinggi filsafat
driyarkara, jakarta

Th. XVIII
No. 4
1991/1992

Penerbit
Sekeloa Publikasi
Senat Mahasiswa
STF DRIYARKARA, Jakarta

Pemimpin Umum
Julius Widiyantoro

Redaksi
Edi, Hendra, Rudi, Sotyo
Puspito, Guido, Ruby,
Sudri

Sekretaris/Administrasi
Puspito, John, Anton

Kuangan
Ferry Santosa

Distribusi
Guido, Sudri, Dony, Dicky

Ilustrator
Rubianto

Alamat Redaksi
Majalah DRIYARKARA
Jl. Persekitan Negara 31 A
Kotak Pos 1397, Jakarta 10013

Terbit
4 (empat) nomor setahun

Harga Langganan
Rp. 7.500,- setahun (4 nomor)
bayar di muka, termasuk Rp. 2.000,-

Ditetak Oleh
Siem Offset Printing
Kemayoran Utara 17 Jakarta
Tel. 417376, 418611

DAFTAR ISI

Dari Redaksi

PROYEK SOSIO-EPISTEMOLOGIS HABERMAS⁸1
Julius Widiyantoro

TEKNOLOGI DAN SAINS SEBAGAI "IDEOLOGI"13
A. Widiyarsono

APA ARTI KRISIS DEWASA INI?
MASALAH-MASALAH LEGITIMASI
DALAM KAPITALISME LANJUT33
Josephus Edi Mulyono

TEKNOLOGISASI DI INDONESIA DAN
UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA53
Tim Redaksi

INDEKS TEMATIS DAN SURAT REDAKSI64
Redaksi



STF Driyarkara berdiri 1 Februari 1969. Nama STF diambil dari nama Prof. Dr. Nicolaus Driyarkara, SJ seorang pakar filsafat Indonesia dan pelopor perkembangan filsafat di kalangan perguruan tinggi. Logo melambangkan bahwa filsafat menuntut baik sifat analitis yaitu sanggup menidalami unsur-unsur permasalahan manusia, maupun sifat sintetis yaitu melihat unsur-unsur itu dalam kesatuannya serta artinya bagi manusia.

TEORI KRITIS HABERMAS SEBUAH ALTERNATIF

Dari Redaksi

Sudah dalam filsafat Hegel kerja dan interaksi dilihat sebagai dua dimensi tindakan dasar manusia atau "praksis yang tidak dapat direduksikan satu sama lain. Karl Marx, tokoh revolusi sosial abad 19 memuatkan kerja di atas interaksi. Baginya, praksis adalah kerja dan semua kegiatan direduksikan kepadanya. Wawasan Marx mengarah pada praksis pembebasan, yaitu perubahan sosial melalui perjuangan kelas.

Generasi pertama Mazhab Frankfurt meradikalkan asumsi praksis pembebasan Marx, tapi dengan minat pada bidang rasio, kesadaran manusia yang justru ditolak Marx. Mereka melihat sejarah kesadaran manusia selalu membeku menjadi mitos dan ideologi seperti teori perjuangan kelas Marx. Namun upaya Mazhab Frankfurt menerobos jalan emansipatoris menghadapi jalan buntu. Rasio kritis yang mereka tekankan ternyata tetap didasari rasionalitas penaklukan yang sesungguhnya berasal dari praksis kerja.

Teori Kritis Habermas muncul sebagai teori alternatif menerobos kemacetan Generasi Pertama. Habermas menekankan kembali apa yang telah dilihat oleh Hegel bahwa kerja dan interaksi tidak dapat direduksikan satu sama lain. Ia mengembangkan teori kritisnya sebagai teori pengetahuan (epistemologis) dan sebagai teori sosial. Proyek Sosio-Epistemologis Habermas menunjukkan garis besar proyeknya dari sudut epistemologis dan Sains sebagai Ideologi lebih menunjukkan aspek kedua, meskipun sebenarnya tidak bisa dipisahkan hitam atas putih. Tulisan ketiga merupakan aplikasi teori Habermas sebagai teori sosial. Dengan menelusuri perkembangan masyarakat kapitalis, Habermas menunjukkan tendensi krisis yang ada sebagai akibat penekanan "rasionalitas penaklukan". Pemikiran Habermas tidak pernah bersifat afirmatif atau memberikan keniscayaan pada proses perubahan sosial.

Masyarakat selalu berkembang dan berubah. Perubahan dapat terjadi dalam masyarakat sebagai sistem atau sebagai dunia kehidupan. Dalam konteks itulah, kesadaran kritis amat dibutuhkan untuk tetap menjaga keseimbangan kedua hakekat di atas. Tulisan terakhir menjadi alternatif melihat kemungkinan-kemungkinan terbuka pengembangan pola pemikiran kritis Habermas dalam konteks masyarakat kita.

PROYEK SOSIO-EPISTEMOLOGIS HABERMAS*

Julius Widiantoro

Pengantar

Berhadapan dengan pemikiran-pemikiran Jürgen Habermas seakan kita berdiri di depan rimba metode berpikir yang kompleks dan berlatar belakang tradisi pemikiran yang panjang. Pemikirannya mengaras baik realitas sosial yang menjadi objek ilmu-ilmu maupun pendekatan yang digunakan oleh ilmu-ilmu itu sendiri. Ia memang bisa diletakkan dalam arus minat yang sudah lama sebelumnya berkembang dalam komunitas tradisi Marxis yang mengawinkan perhatian pada realitas sosial maupun minat pada bidang filsafat.

Istilah sosio-epistemologis kiranya bisa menggambarkan cakupan keprihatinan yang melahirkan pemikiran-pemikirannya seputar realitas sosial maupun pengetahuan akan realitas sosial itu sendiri. Itu berarti menyentuh juga filsafat pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan sekaligus ilmu-ilmu sosial. Pemikirannya bergerak dalam bentang filsafat yang membahas pertautan pengetahuan rasional dan fenomena-fenomena sosial. Dan, karena tidak dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem universal melainkan mengarah pada pemikiran terbuka untuk dirubah-sempurnakan yang masih berlangsung sampai sekarang maka tidak berlebihan kalau disebut sebagai proyek yang bukan merupakan suatu pemikiran final.

Untuk melihat posisi Habermas kita akan mengarahkan pandangan sekilas pada latar belakang pemikirannya. Itulah maksud uraian titik tolak Teori Kritis dan kemacetannya di bawah ini. Menyusul garis besar titik tolak proyek epistemologisnya. Habermas bermaksud menunjukkan adanya pertautan antara pengetahuan dan kepentingan yang dilakukan untuk mengkritik paham kebebasan nilai. Sekaligus akan dijadikan awal guliran bola salju pemikirannya.

* Tulisan ini semula adalah teks untuk seminar Habermas dan dirubah sesuai permintaan redaksi

1. Titik Tolak Teori Kritis dan Kemacetannya

Teori Kritis muncul sebagai jawab atas pertanyaan-pertanyaan bagaimana teori dapat memberi pengertian rasional tentang diri manusia dalam alam lingkungannya. Juga bagaimana teori bisa menjadi emansipatoris bagi masyarakat yang irrasional dari sudut pandang penganut Horkheimer yang banyak menimba konsep irrasionalitas dari kalangan Marxis. Dalam artikel berjudul *Traditional and Critical Theory* yang dimuat dalam *Zeitschrift für Sozialforschung* pada tahun 1937 ia membedakan paham teori sosial yang menerapkan paham teori ilmu-ilmu alam pada gejala-gejala kemasyarakatan dan Teori Kritis yang diarahkan untuk menjadi teori emansipatoris.

Horkheimer mengkritik Teori Tradisional yang berikhtiar mencapai *a universal systematic science* yang konsep-konsepnya dijadikan semacam instrumen netral untuk menganalisis apa saja dan dapat digunakan pada setiap kesempatan. Penerapan konsep-konsep umum itu membawa konsekuensi bahwa pengetahuan itu bersifat kontemplatif, lepas dari konteks ruang dan waktu. Ilmuwan yang menganut Teori Tradisional ini mengambil distansi penuh terhadap realitas sosial dan ingin mencapai objektivitas semurni mungkin. Berbagai macam nilai harus ditanggalkan dalam setiap riset dan penelitian yang mereka lakukan karena mereka tidak bermaksud untuk mempengaruhi fakta. Hal itu juga dipegang teguh oleh kaum positivisme yang berasumsi bahwa ilmu pengetahuan mencukupi dirinya sendiri, berdikari dan bebas. Dengan begitu tidak mengherankan kalau dalam positivisme metodologi ilmu pengetahuan dijunjung tinggi.

Secara singkat dapat disebutkan ada tiga ciri dalam Teori Tradisional: netral terhadap fakta di luarnya, ahistoris dan memisahkan antara teori dan praksis. Ketiga sifat itu menjadikan Teori Tradisional ideologis karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, kenetralannya yang muncul karena si ilmuwan memandang fakta secara lahiriah dengan hati dingin untuk mencapai objektivitas menjadi kedok pelestarian *status quo*. Sifat ahistoris menjadikan Teori Tradisional mengklaim ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya sarana untuk 'menyelamatkan dan memajukan' masyarakat. Sedangkan pemisahan antara teori dan praksis menjadikannya bersifat ideologis yang melestarikan irrasionalitas masyarakat. Bahkan akhirnya kebutuhan akan sikap metodologis merosot menjadi kebajikan yang patut dicurigai secara sehat.

Sebaliknya Horkheimer menawarkan teori yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan membebaskan manusia dengan rasionalitas dan dengan demikian memberikan juga kesadaran demi pembangunan masyarakat rasional yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan dan kemampuannya. Teori tandingan itu diberi nama Teori Kritis yang justru punya asumsi dasar bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat historis, curiga dan kritis terhadap fakta empiris serta tidak memisahkan antara teori dan praksis.

Ilmu pengetahuan bersifat historis maksudnya bahwa ilmu pengetahuan dipahami sebagai hasil proses historis manusia dalam totalitasnya di mana terjadi kontradiksi antara yang sadar atau rasional dengan aspek irrasionalitas. Totalitas itu menjadi kerangka berpikir dalam Teori Kritis. Penganut Teori Kritis secara kritis akan bersikap curiga terhadap kategori-kategori yang berlaku dan diterima secara umum. Horkheimer berusaha menguak fungsi apa yang diemban dibalik selubung kategori-kategori yang kadang nampak begitu luhur dan objektif seperti produktif, berguna, bernilai dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kategori-kategori itu sudah membeku dan hanya mau melanggengkan situasi yang ada.

Menurut Horkheimer Teori Tradisional gagal menjadi teori emansipatoris karena sifatnya yang netral terhadap masyarakat. Padahal kenetralan itu semu belaka karena akhirnya bersikap netral berarti juga memihak kepentingan tertentu. Jadi tidak bebas.

Kecuali itu Teori Kritis tidak memisahkan antara teori dan praksis. Menurut penganutnya realitas sosial adalah produk yang ada di bawah kontrol subjek. Jadi sebenarnya fakta dipengaruhi oleh subjek pengetahuan. Mustahil pengetahuan dikejar semata-mata demi pengetahuan itu sendiri. Teori Kritis tidak mau melestarikan *status quo*, sebaliknya memuat potensi transformatif seraya senantiasa kritis dan mengevaluasi diri agar tidak membeku menjadi ideologi.

Dengan gaya pemikiran yang diwarnai epistemologis idealisme Jerman yang dilontarkan Kant dan Hegel, epistemologi Karl Marx serta dilengkapi dengan psikoanalisis yang dikembangkan Freud Mazhab Frankfurt "menerapkan terapi" Teori Kritis terhadap masyarakat industri maju. Karya yang mencolok karena pemikirannya dan cukup fenomenal adalah *One-Dimensional Man* karya Herbert Marcuse dan karya konsorsium antara Adorno dan Horkheimer yang berjudul *Dialectics of Enlightenment*.

Enlightenment sebenarnya sudah berawal sejak jaman Yunani kuno manakala manusia berusaha memahami diri dan alamnya secara rasional

dan berkembang sampai pada jaman melajunya kemajuan ilmu alam dan teknologi. Namun emansipasi itu bergeser menjadi irrasional dan represif dalam sistem masyarakat kapitalis-industrial. Tragisnya, semula adalah buah dari *Enlightenment* namun berbalik memperbudak dan melahirkan dehumanisasi. Menurut Adorno dan Horkheimer yang masih tertinggal adalah kesimpulan dramatis yang mencanangkan sikap pesimis terhadap pengetahuan dan modernisasi. Ternyata pencerahan yang menghasilkan pemikiran kritis emansipatoris yang ditempuh dengan menghancurkan mitos akhirnya membeku menjadi mitos dan ideologi baru. Kedua karya monumental itu memperlihatkan kemacetan proyek Teori Kritis. Dalam selang waktu yang tidak lama tokoh-tokoh Teori Kritis meninggal secara berturut-turut: Adorno (1969) disusul Horkheimer (1973) dan Marcuse (1979).

2. Habermas sebagai Penerus Mazhab Frankfurt

Dalam *Knowledge and Human Interests* Habermas menelusuri asal-usul epistemologis Teori Kritis. Berdasarkan asumsi bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui sejarah filsafat maka dalam mengkritik positivisme ia menempuh metode uraian yang bersifat historis. Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Frankfurt pada tanggal 28 Juni 1965 ia menguraikan akar-akar pemahaman positivistic, saintis dan objektivistis sebagaimana dikritik oleh Mazhab Frankfurt sebelumnya. Teks pidato itu kemudian dijadikan appendiks dalam buku *Knowledge and Human Interests* Habermas juga ingin mengembalikan pengetahuan sebagai 'salah satu bentuk pengetahuan yang mungkin' tentang kenyataan namun bukan sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan sebagaimana dianut dalam Teori Tradisional.

Horkheimer menuduh positivisme jatuh ke dalam dogmatisme karena mengklaim ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya yang bisa "menyelamatkan" masyarakat. Pembentengan dari kritik yang dilakukan positivisme juga dikritik oleh Habermas dan akan diuraikan lebih lanjut dalam kaitannya sebagai penerus Teori Kritis dan sekaligus sebagai pembuka jalan buntu yang dialami para pendahulunya. Pemikiran Habermas tersebar dalam berbagai tulisannya dan hampir mustahil mengharapkan adanya kerangka final. Uraian singkat ini sedikit banyak bertitik tolak dari teks appendiks tersebut.

Teks tersebut diawali dengan penjemihan arti asli kata teori dan pergeserannya. Menarik bahwa Habermas telah membedakan tiga macam kategori ilmu pengetahuan, yaitu *empiris-analitis*, *historis-hermeneutis* dan *ilmu-ilmu kritis* yang masing-masing mempunyai kepentingan tertentu. Habermas berusaha memperlihatkan adanya hubungan antara pemahaman diri ilmu-ilmu positivistic dan ontologi tradisional yang melahirkan *disinterested knowledge* atau pengetahuan yang bebas nilai. Argumen untuk menentang paham kebebasan nilai yang dianut ilmu-ilmu positivistic digumpalkan ke dalam lima tesis.

a. Arti Kata Teori dan Pergeserannya

Habermas menepokkan fenomena pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan manusia, antara teori dan praksis mulai dengan yang hidup dalam tradisi dan kebudayaan Yunani purba. Pada jaman itu ada pertautan erat antara teori dan praksis. Istilah *bios theoretikos* merangkumnya dengan cukup jelas. Istilah itu berarti bahwa berkat teori manusia dapat memperoleh suatu orientasi untuk bertindak secara bijak dan tepat sehingga praksis hidupnya dapat merealisasikan cita-cita etis lewat pembebasan dari perbudakan *dora* (pendapat) untuk mencapai otonomi dan kebijaksanaan hidup baik secara individual maupun secara komunal dalam sebuah *polis*.

Istilah teori *theoria* ditemukan akarnya pada ritus keagamaan di *polis-polis* dalam masyarakat Yunani purba. Sebenarnya *Theoros* adalah seorang wakil yang diutus warga *polis* dalam suatu upacara keagamaan. Tugasnya adalah mengamati, memandang peristiwa-peristiwa sakral yang dihadirkan kembali. Lewat tindakan itu manusia mengalami pembebasan atau emansipasi dari nafsu-nafsu rendah. Ia mengalami *katharsis*. Dalam terminologi filsafat *theoria* digeserkan dari tindakan pengamatan peristiwa-peristiwa sakral ke dalam pengamatan kosmos. Dalam mengamati tatanan kosmos mau tidak mau manusia akan menyelaraskan diri, berusaha membuat harmoni dengan kosmos. Ia berusaha mendamaikan proporsi-proporsi tata tertib kosmos ke dalam dirinya. Etos *mimesis* alam ini memperlihatkan bagaimana teori memasuki praksis kehidupan manusia. Melalui teori manusia mengalami proses pembentukan diri yang memunculkan kesadaran dirinya sebagai mikrokosmos.

Melalui pemahaman teori sebagai tindak pengamatan atau kontemplasi atas kosmos sekaligus berarti filosof meletakkan garis pemisah antara Ada dan Waktu. Antara yang tetap dan yang berubah-ubah. Filosof cenderung

mencari dan menyusun konsep-konsep dan memadatkan dalam rumus-rumus baku apa yang menjadi inti kosmos yang tidak lekang terhadap perubahan dan bisa diterapkan dalam pelbagai situasi. Oleh karena itu teori harus dibebaskan dari dorongan-dorongan subjektif manusia. Tujuannya adalah agar dapat memahami kenyataan sebagaimana adanya. *Katharsis* lewat ritus mistis keagamaan digantikan dengan teori yang sedikit demi sedikit mengikis *bias theoretikos* dan akan melahirkan pengetahuan yang bebas nilai. Namun sebenarnya tanpa disadari pembersihan diri dari subjektivitas itu juga mengedepankan sikap teoritis murni untuk mencapai kepentingan pengetahuan demi pengetahuan. Lewat demitologisasi teori dipisahkan dari praksis.

Habermas mengangkat isu seputar pengetahuan dan praksis ilmu pengetahuan yang beralaskan pemikiran fenomenologis Husserl. Fenomenologis Husserl muncul karena keprihatinannya akan krisis yang menimpa ilmu pengetahuan. Menurut Husserl krisis tidak menyangkut ilmu pengetahuan melainkan krisis ilmu sebagai ilmu pengetahuan. Kadang dipertajam sebagai krisis karena interpretasi berat sebelah ilmu pengetahuan yang akhirnya memudahkan bahkan mematikan peranan subjek.

Habermas melihat bahwa Keprihatinan Husserl mengacu pada ketidakmampuan ilmu pengetahuan memberikan jawaban atas kesulitan hidup jaman itu. Misalnya dampak yang ditimbulkan tragedi Perang Dunia II. Mirip filosof-filosof sebelumnya yang menggunakan ide tentang pengetahuan yang menjamin kelangsungan hubungan platonis antara teori murni dan praksis kehidupan demikian juga yang ditempuh Husserl. Bukan kandungan teori yang dipentingkan melainkan kekuatan teori untuk membentuk sikap hidup yang bijak dan berwawasan luas yang akan melahirkan suatu kebudayaan ilmiah. Menurut Husserl kecenderungan historis ini terancam dari dalam karena disiplin ilmu makin meninggalkan teori dalam arti yang sebenarnya, terutama dalam ilmu fisika.

b. Tiga Kategori Ilmu Pengetahuan, Metodologi serta Kepentingannya

Habermas memperlihatkan pertautan antara pemahaman diri ilmu-ilmu positivistic dengan ontologi tradisional lewat tiga macam kategori ilmu pengetahuan. Dengan menyimak proses penelitian bisa dilihat hubungan spesifik antara aturan logis-metodes dengan kepentingan-kepentingan yang akan mengarahkan pengetahuan.

Pertama, ilmu-ilmu *empiris-analitis*. Yang masuk dalam kategori ini adalah ilmu-ilmu alam dan sosial sejauh punya tujuan untuk menghasilkan pengetahuan nomologis. Ia mengembangkan teori mereka dengan mengikatkan diri pada suatu sikap teoritis yang bebas dari ikatan dogma-dogma dan pengaruh yang mengganggu kepentingan-kepentingan hidup alami. Ilmu-ilmu ini bertujuan mendeskripsikan atau 'memotret' fakta dan alam semesta secara teoritis dalam tatanannya yang harmonis persis sebagaimana adanya.

Untuk membangun teorinya dan mengujinya secara kritis seorang ilmuwan dari kalangan *empiris-analitis* mengambil sikap terlebih dahulu terhadap makna dari pernyataan-pernyataan yang akan dihasilkannya. Ungkapan linguistiknya menggunakan cara deduktif-nomologis. Cara ini bisa diterapkan dalam dua jalur, untuk mencari hukum atau untuk menjelaskan gejala. Maka terbuka kemungkinan untuk membentuk prognosis-prognosis di bawah kondisi-kondisi awal yang sudah ditentukan. Meskipun makna prognosis itu, yang amat mungkin dimanfaatkan secara teknis, baru diperoleh dari aturan mengenai penerapan dalam kenyataan. Karena ilmu empiris berusaha mendasari objektivitas kepada pengamatan dikatakan ia dapat memperoleh kebenaran yang langsung dan eviden.

Padahal sebenarnya proporsi-proporsi dasar tersebut bukan merupakan hasil representasi murni dari fakta-fakta tetapi merupakan hasil dari proses penelitian dan eksperimen. Dan, meskipun fakta-fakta bisa ditangkap secara deskriptif tetapi tidak dapat mengelabui bahwa sebenarnya hasil pernyataannya merupakan pengorganisasian secara konsensus di antara para ahli yang terlibat dalam proses itu. Proses penelitian tempat terjadinya hubungan intersubjektif di antara para ilmuwan dikesampingkan dan tidak direfleksikan. Letak kepentingan teknis ini tampak dalam ilmu-ilmu alam sebagai pelaksanaan rasio-instrumental yang sejak awal berobsesi untuk mengontrol proses-proses alam ke taraf ilmiah.

Kategori kedua adalah ilmu-ilmu *historis-hermeneutis* yang menurut Habermas mempunyai kepentingan kognitif-praktis. Tidak seperti kategori yang pertama ilmu-ilmu *historis-hermeneutis* tidak ada sangkut pautnya dengan kosmologi. Yang termasuk dalam kategori kedua ini adalah ilmu-ilmu budaya dan sosial sejauh mengarah pada interpretasi konfigurasi pemahaman makna dalam teks. Jalan yang ditempuh untuk membangun pengetahuan bukan melalui eksperimen berulang kali demi terbentuknya pernyataan-pernyataan deduktif-nomologis melainkan dengan jalan pemahaman makna. Pengujian-pengujian hipotesis digantikan oleh

penafsiran teks. Ungkapan linguistiknya adalah bahasa sehari-hari sehingga aturan-aturannya menentukan kemungkinan makna pernyataan-pernyataan ilmu-ilmu humaniora. Dalam hal ini penafsir menempatkan diri dalam cakrawala dunia dan bahasa yang daripadanya diturunkan suatu teks secara turun-temurun memperoleh maknanya. Yang ada adalah hubungan antara subjek dan subjek bukan subjek dan objek seperti dalam kategori pertama.

Akan tetapi seperti pada ilmu-ilmu *empiris-analitis* fakta-fakta baru mengkonstitusikan diri dalam hubungan dengan norma-norma pemastiannya. Norma-norma pemastian dalam ilmu ini dipengaruhi dunia pra-anggapan penafsir. Jadi penelitian atau riset hermeneutis yang bermaksud mengungkapkan interpretasi ada di bawah garis bimbingan kepentingan untuk mempertahankan dan memperluas intersubjektivitas itu. Habermas menyebutnya dengan 'kepentingan kognitif-praktis atau kepentingan praktis.

Sebenarnya ada kesejajaran antara ilmu-ilmu *historis-hermeneutis* dengan ilmu-ilmu *empiris-analitis*. Dalam pemahaman hermeneutis sebagai metode ilmu-ilmu budaya dapat memperoleh kemajuan dengan mengaitkan bahasa dan praksis lewat lingkaran hermeneutik maka dalam ilmu-ilmu *empiris-analitis* ada proses belajar kumulatif dan logika penelitian Peirce. Namun sebelum ada penarikan garis batas yang lebih jelas mengenai metode yang digunakan ilmu-ilmu *historis-hermeneutis* mengikuti metode-metode ilmu-ilmu alam yang berpuncak pada positivisme dan jatuh dalam saintisme karena bercita-cita untuk menyatakan realitas terstruktur dalam deskripsi teoriti. Dengan kata lain historisisme dipaksa menjadi positivisme ilmu-ilmu humaniora walau sebenarnya fakta-fakta dalam lingkup ilmu *historis-hermeneutis* ini hanya dapat ditangkap melalui jalan *verstehen* atau pemahaman dan bukan lewat jalan *erklären* seperti dalam ilmu-ilmu alam.

Dan, sebagai kategori ketiga Habermas menyebutnya ilmu-ilmu *kritis* yang mempunyai kepentingan emansipatoris. Psikoanalisis dan Kritik Ideologi dikedepankan sebagai contoh ilmu pengetahuan yang bermuatan refleksi diri dan kritis. Sebagaimana ilmu-ilmu *empiris-analitis*, ilmu-ilmu *historis-hermeneutis* mengarahkan diri untuk menghasilkan pengetahuan nomologis. Lain halnya dengan ilmu-ilmu sosial yang kritis. Tujuannya lebih dari sekedar menciptakan pernyataan-pernyataan deduktif-nomologis. Ilmu-ilmu *kritis* memusatkan perhatian untuk menentukan kapan pernyataan-pernyataan teoritis dapat memahami tatanan teratur yang tidak

berubah dari tindakan-tindakan sosial pada umumnya dan kapan ia dapat menangkap hubungan ketergantungan yang secara ideologis sudah membeku namun sebenarnya secara prinsipial dapat diubah. Pengetahuan ini dihasilkan melalui jalan refleksi diri sehingga tahap kesadaran yang telah direfleksikan, yang termasuk dalam kondisi-kondisi awal suatu hukum keteraturan dapat diubah.

Refleksi diri ini membebaskan subjek dari jerat ketergantungan pada kekuatan-kekuatan yang sudah dihipostatiskan dan berlaku umum. Menurut Habermas proses tersebut dikondisikan suatu kepentingan emansipatoris. Ia berbicara tentang adanya bentuk pengetahuan ketiga yang mau tidak mau mengaitkan antara teori dan praksis yang erat kaitannya dengan proses pembentukan diri manusia sebagai individu maupun lewat kebersamaannya dalam suatu komunitas.

c. Argumen Tandingan Positivisme dan Terbentuknya Pengetahuan

Kedua bentuk kategori ilmu pengetahuan yang pertama dihasilkan rasio yang berkehendak untuk bebas dari kendala-kendala alamiah dan interaksi sosial. Sedangkan ilmu-ilmu *kritis* dibimbing oleh garis kepentingan emansipatoris. Pembersihan pengetahuan dari kepentingan yang melahirkan paham *disinterested knowledge* memuncak pada positivisme yang punya asumsi dasar bahwa pengetahuan yang sah hanyalah pengetahuan mengenai fakta objektif. Kemajuan besar yang dicapai oleh ilmu-ilmu alam dan teknologi meneguhkan asumsi tersebut. Oleh Mazhab Frankfurt, terutama sudah muncul ada sejak Horkheimer, dogmatisme itu dikecam sebagai bentuk saintisme.

Dari pengalaman hidup, ide-ide sering digunakan untuk merasionalisasikan motivasi tindakan yang sebenarnya. Jika dalam skala kolektif hal itu bisa menjadi ideologi. Begitu pula dengan pernyataan-pernyataan positivisme. Gambaran yang digunakan untuk membangun pengetahuan tidak terlepas dari norma-norma. Setelah secara panjang lebar mendiskusikan kepentingan yang mengarahkan bentuk-bentuk ilmu pengetahuan Habermas masuk pada pembicaraan pertautan di antara keduanya. Untuk menentang paham kebebasan nilai yang dianut positivisme sekaligus memaparkan apa itu pengetahuan ia mengajukan lima tesis sebagai argumen tandingan.

- [1]. *Pencapaian hasil subjek transendental memiliki titik pijak dalam sejarah alam dan spesies manusia*. Habermas meletakkan pemikiran

mengenai pengetahuan dalam cakrawala pengalaman perjalanan sejarah hidup manusia sebagai spesies. Akal budi manusia kecuali berfungsi sebagai alat adaptasi dan mempertahankan diri juga mampu mendorong manusia mencari universalitas. Misalnya dengan membangun pranata/sistem sosial seperti masyarakat, kebudayaan dan lain sebagainya.

- [2]. *Pengetahuan digunakan juga sebagai alat dan melampaui dari sekedar sebagai organ untuk mempertahankan diri.* Dari usaha memahami realitas Habermas menetapkan tiga kategori pengetahuan yang mungkin: informasi yang memperluas kemampuan penguasaan teknis, interpretasi yang memungkinkan pengarahannya di dalam tradisi pada umumnya dan analisis yang membebaskan kesadaran dari ketergantungan kekuatan-kekuatan yang dihipostatiskan. Di antara kutub pertahanan diri sebagai pengalaman empiris spesies manusia dengan kutub transendental pengetahuan itu terletaklah berbagai kepentingan. Kepentingan ini mengarahkan manusia maka disebut *kepentingan kognitif*. Kepentingan itu mewujudkan dalam kepentingan teknis, praktis dan emansipatoris.
- [3]. *Kepentingan-kepentingan yang mengarahkan pengetahuan terbentuk dalam media kerja, bahasa dan kekuasaan.* Ia memasukkan kepentingan komunikasi melengkapi kekurangan perspektif dasariah Marx. Konfigurasi pengetahuan dan kepentingan tidak sama dalam semua kategori. Hanya lewat refleksi diri akal budi dapat merenungkan kembali jalinan hubungan yang sebelumnya mempertautkan subjek dan objek. Di dalam refleksi diri, usaha untuk terus-menerus membebaskan diri dari kendala-kendala ini, akal budi dapat merenungkan kembali hubungan kepentingan yang sebelumnya mempertautkan subjek-objek.
- [4]. *Dalam kekuatan refleksi diri pengetahuan dan kepentingan menyatu.* Hanya dalam masyarakat yang sudah mengalami emansipasi saja komunikasi akan berkembang menjadi dialog yang tidak dibayangi dominasi kekuasaan. Kesemua ontologis dari teori murni dengan kepentingan-kepentingan yang mengarahkan akan menghilang.
- [5]. *Kesatuan antara pengetahuan dan kepentingan membuktikan dirinya*

dalam dialektika yang jejak-jejak sejarahnya dari dialog yang ditindas merekonstruksikan apa yang telah ditindasnya. Teori murni yang menghendaki segala sesuatunya berasal dari dirinya sendiri akan merosot menjadi ideologis. Lewat proses dialektis apa yang dulu pernah dikesampingkan atau ditindas terbuka kemungkinan untuk terangkat kembali. Begitulah gerak maju bangsa manusia menuju kedewasaan dalam jalur pengetahuan.

d. Psikoanalisis dan Kritik Ideologi sebagai Teori Kritis

Seperti sudah disinggung di atas Habermas memberi contoh psikoanalisis Freud dan Kritik Ideologi Marx sebagai pengetahuan yang dinilai bermuatan refleksi diri dan kritis. Namun juga ditunjukkan bahwa keduanya akhirnya terjerumus dalam kecondongan determinis-positivistis. Secara amat singkat keduanya akan disinggung di sini.

Freud peletak dasar disiplin baru dalam bidang dan sekaligus masuk dalam diskusi metodologis. Ia berjasa 'menggabungkan' metode analisis bahasa dan psikoanalisis yang kemudian ada yang mengistilahkan dengan *depth hermeneutic*. Seorang analisis tidak hanya mencari arti dari teks yang terdistorsi tetapi juga mau menerangi arti dari distorsi itu sendiri. Lewat metode analisis mimpi teks-teks yang terdistorsi yang diduga justru memuat maksud sebenarnya penghasil teks. Maksud-maksud sebenarnya justru ada dalam *internal foreign territory* seseorang. Sedangkan dalam kaca mata hermeneutis biasa teks dianggap berasal dari kesadaran intensional. Psikoanalisis menggunakan metode mimpi menerjemahkan ketidaksadaran menjadi kesadaran, disitulah terletak unsur emansipasi. Habermas mengkritik Freud manakala dari refleksi praktek klinisnya ia memformulasikan struktur dasar kepribadian manusia ke dalam *triangel* yang saling berkaitan. Ketiga unsur tersebut adalah *id*, *ego* dan *superego*. Formulasi itu dinilai sebagai terminal akhir pemikiran kritis Freud.

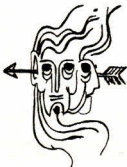
Sedangkan kegagalan kritik ideologi Marx gagal dilihat karena ia mendasarkan pemahaman kegiatan revolusioner pada paradigma kerja dalam konteks tindakan rasional-bertujuan dan melupakan konteks tindakan komunikasi. Habermas berpendapat bahwa kekurangan Marx bisa diatasi dengan teori psikoanalisis Freud. Proses sejarah dimengerti sebagai proses yang diarahkan oleh proses produksi diri dalam paradigma kerja dan proses pembentukan diri dalam kondisi komunikasi yang terdistorsi. Dialog analitis yang dikembangkan dalam metode psikoanalisis dijadikan Habermas membangun proyeknya.

Penutup

Kemajuan besar dalam lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menandai perjalanan manusia. Mampu membebaskan manusia dari kerja tangan sehingga bisa hidup lebih manusiawi. Namun ternyata realitas sosial tidak bisa ditarik secara sepihak karena di lain pihak kemajuan ilmu dan teknologi dijadikan alat represi dan menjadikan dehumanisasi. Sebagai instrumen teknologi yang netral itu dimuati kepentingan tertentu oleh mereka yang mampu memanfaatkannya.

Habermas berjasa antara lain karena menyumbangkan terobosan kemacetan para pendahulunya dalam kalangan Mazhab Frankfurt. Usaha itu dilakukan lewat penelaahan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan ideologi, tiga unsur yang saling berkaitan erat dengan praksis kehidupan. Ia membangun Teori Kritis yang berkepentingan untuk membebaskan sekaligus menyembuhkan masyarakat yang terjatoh jaring ideologis melalui kritik ideologi.

-ooOoo-



TEKNOLOGI DAN SAINS SEBAGAI "IDEOLOGI"

("Rasionalisasi" Weber menurut Habermas)

A. Widyarsono

Pengantar

Technology and Science as "Ideology" membahas Teori Kritis Habermas sebagai teori sosial, yakni dalam usahanya merumuskan kembali proses rasionalisasi masyarakat modern. Perkembangan rasionalisasi masyarakat modern juga menjadi keprihatinan utama para pendahulu Habermas, Generasi Pertama Teori Kritis.

Generasi Pertama Teori Kritis mengkritik masyarakat modern yang mereka anggap bobrok dalam dua cara. Pertama menelusuri kembali akar-akar munculnya pola dan cara berpikir positivitis masyarakat modern dengan merefleksikan proses rasionalisasi di dalam masyarakat Barat yang dirintis Adorno dan Horkheimer dalam *Dialektik der Aufklärung*. Kedua, menunjukkan bahwa cara berpikir positivitis yang telah mewujudkan dirinya dalam sains dan teknologi berlaku sebagai ideologi sebagaimana Marcuse menganalisisnya dalam *One-Dimensional Man*.¹

Dengan kedua cara itu mereka sampai pada kesimpulan bahwa pencerahan telah membuahkan *Zweckrationalität* (rasionalitas-bertujuan), sumber dari berbagai bentuk saintisme, positivisme, teknokratisme, dan barbarisme gaya baru. Pandangan mereka tentang rasionalitas modern ini sebenarnya merupakan radikalisasi teori rasionalisasi Weber dengan mendapat banyak inspirasi dari pandangan-pandangan G. Lukács mengenai reifikasi.² Gagasan tentang reifikasi ini mendapat perumusan baru dalam konsep para pendahulu Habermas mengenai rasio instrumental yang telah menguasai berbagai bidang kehidupan. Dalam perspektif Weberian, dapat dikatakan bahwa Generasi Pertama Teori Kritis memandang proses rasionalisasi secara pesimistis sehingga tidak terbuka jalan bagi pembebasan. Apakah memang benar bahwa proses rasionalisasi hanya memimpin ke jalan tunggal, yakni jalan perbudakan teknologis?³

Dalam esai *Technology and Science as "Ideology"* yang dipersembahkan kepada H. Marcuse berkenaan dengan ulang tahunnya yang ke-70, Habermas menanggapi jalan buntu yang dialami para pendahulunya. Secara khusus dia menanggapi pendapat Marcuse bahwa sains dan teknologi telah menjadi ideologi. Bertolak dari kritik Marcuse terhadap paham rasionalitas Weber, Habermas menunjukkan bahwa Marcuse tetap terbelenggu oleh kerangka pikiran Marx yang mengembalikan semua tindakan manusia pada pekerjaan dan mau menjelaskan perkembangan masyarakat melulu dari perkembangan alat-alat produksi. Jalan keluar yang ditawarkan Marcuse hanyalah harapan yang mustahil, yakni bahwa sains dan teknologi yang saat ini represif, suatu saat nanti dapat diganti dengan yang tidak represif.

Pemikiran Habermas tentang proses rasionalisasi akan dipaparkan secara objektif dengan mengikuti rangkaian argumentasi yang dikemukakannya dalam esai *Technology and Science as "Ideology"*. Tulisan ini akan dibagi menjadi 4 bagian. (1) Proses rasionalisasi dalam masyarakat Barat yang gagal dijelaskan secara memuaskan oleh Max Weber dan Marcuse (2) Titik tolak Habermas dalam merumuskan kembali proses rasionalisasi itu, yakni berdasarkan perbedaan antara kerja dan interaksi. (3) Proses rasionalisasi dalam masyarakat Barat sejak jaman pra-kapitalis, kapitalisme liberal, sampai jaman masyarakat kapitalisme lanjut (*Spätkapitalismus*) yang dirumuskan kembali secara panjang lebar oleh Habermas. Akibat perkembangan itu, dua kategori kunci teori Marx tentang perjuangan kelas dan ideologi tidak dapat digunakan begitu saja dalam masyarakat kapitalisme tua. Usaha Habermas untuk merumuskan kembali kedua kategori ini dibahas dalam bagian ini pula. (4) Kesimpulan Habermas bahwa proses rasionalisasi berjalan timpang dalam masyarakat kapitalisme lanjut. Dia memberikan sumbangan bagi konsep rasionalisasi yang sewajarnya terjadi berdasarkan perbedaan dua tindakan dasar manusia.

1. Permasalahan: Rasionalisasi menurut Weber dan Marcuse

Habermas menjelaskan dua arti rasionalisasi menurut Max Weber. Pertama, perluasan bidang-bidang sosial yang berada di bawah norma-norma pengambilan keputusan yang rasional. Kedua, industrialisasi kerja sosial yang mengakibatkan norma-norma tindakan instrumental juga memasuki bidang hidup yang lain. Di dalam kedua kecenderungan itu tindakan rasional-bertujuan (*Zweckrationaldes Handeln*) menjadi berlaku

umum. "Rasionalisasi" masyarakat ini berkaitan juga dengan institusionalisasi perkembangan sains dan teknologi yang mengakibatkan legitimasi-legitimasi lama dibongkar. Sekularisasi dan "hilangnya daya pesona" (*disenchantment*) dunia yang mengarahkan tindakan, tradisi kebudayaan sebagai keseluruhan, merupakan segi negatif perkembangan "rasionalitas" tindakan sosial.

Marcuse, menurut Habermas, telah menggunakan analisis Weber di atas sebagai titik tolak untuk membuktikan bahwa pengertian formal rasionalitas memiliki implikasi tertentu. Dia yakin dalam apa yang disebut Weber sebagai *rasionalisasi* tidak berlaku *rasionalitas* itu sendiri, namun suatu bentuk kekuasaan politis yang terselubung di baliknya. Rasionalitas ini hanya menyangkut relasi-relasi penguasaan teknis yang mungkin sehingga menuntut jenis tindakan yang menunjukkan kekuasaan atas alam dan masyarakat. Maka rasionalisasi kondisi-kondisi kehidupan sama artinya dengan pelembagaan kekuasaan yang kandungan politisnya tidak bisa dikenali kembali. Kritik Marcuse terhadap Weber ini menyimpulkan bahwa "pengertian rasio teknis sendiri mungkin ideologis."

Marcuse juga melihat bahwa di dalam masyarakat kapitalis kekuasaan cenderung kehilangan wataknya yang menindas, namun menjadi rasional. Kekuasaan menjadi rasional dalam sistem yang memanfaatkan kemajuan teknis-ilmiah sebagai dasar legitimasinya bagi peningkatan tenaga-tenaga produktif. Penindasannya terletak dalam "intensifikasi penundukan individu di bawah aparat produksi dan distribusi yang dahsyat". Paradoksnya, penindasan itu hilang dari kesadaran masyarakat karena legitimasinya terletak pada "semakin meningkatnya produktivitas dan penguasaan alam, yang memungkinkan kehidupan individu menjadi semakin nyaman".

Menurut Marcuse, dengan membuka kedok ideologis hubungan-hubungan produksi kapitalisme awal, "rasionalitas" Weber memiliki wajah mendua, yakni tidak hanya menjadi ukuran kritis bagi keadaan tenaga-tenaga produktif yang menjadi represif, namun juga menjadi ukuran apologetis yang membenarkan hubungan-hubungan produksi sebagai suatu kerangka kerja institusional yang sesuai dengan fungsinya. Bahkan dengan unsur apologetisnya, "rasionalitas" sebagai ukuran kritis cenderung diturunkan menjadi sekedar alat koreksi *di dalam* sistem, sehingga paling banter hanya dapat mengatakan bahwa "telah terjadi kesalahan dalam menyusun program" masyarakat. Inilah yang disebut Marcuse sebagai sesuatu yang baru dalam sejarah dunia.

Manusia yang terpicat oleh sains dan teknologi tanpa disadari ditelan oleh kekuasaan sains dan teknologi sebagai sistem total yang menguasai berbagai bidang kehidupan manusia. Marcuse menyatakan:

Dewasa ini, kekuasaan melestarikan dan memperluas dirinya tidak hanya melalui teknologi melainkan sebagai teknologi, dan teknologi menyediakan legitimasi yang kuat bagi kekuasaan-politis yang sedang meluas, yang mengabsorpsi segala bidang kebudayaan.²

Maka Marcuse menyimpulkan bahwa "rasionalisasi" Weber tidak hanya merupakan suatu proses jangka panjang perubahan struktur-struktur sosial, melainkan juga merupakan "rasionalisasi" dalam pengertian Freud: motif yang sebenarnya, yakni mempertahankan kekuasaan yang sudah usang, disembunyikan di balik dalih-dalih perintah-perintah rasional-bertujuan. Dalam hal ini Habermas memuji Marcuse sebagai orang pertama yang menjadikan "kandungan politis rasio teknis" sebagai titik tolak analisis teori tentang masyarakat kapitalis akhir.

Habermas selanjutnya menunjukkan ambiguitas konsepsi Marcuse tersebut. Jika fenomena yang menjadi dasar analisis sosial Marcuse (yakni *peleburan yang aneh antara teknologi dan kekuasaan*) hanya dapat diinterpretasikan sebagai *proyek dunia*, emansipasi sosial tidak mungkin dibayangkan tanpa merevolusionerkan sains dan teknologi sendiri. Marcuse membayangkan perubahan arah kemajuan sains yang dapat memutuskan ikatan yang fatal antara teknologi dan kekuasaan yang juga akan mempengaruhi struktur sains itu sendiri. Sains yang baru diharapkannya "akan sampai pada *pengertian-pengertian yang pada hakekatnya lain* mengenai alam dan akan menemukan *fakta-fakta yang pada hakekatnya lain*". Marcuse juga membayangkan dibangunnya metodologi sains yang baru, yakni metodologi yang tidak lagi menjadikan alam sebagai objek penguasaan teknis, melainkan sikap memelihara dan merawat yang membebaskan potensi-potensi alam.

Menurut Habermas, harapan Marcuse ini tidak mempunyai dasar historis yang kuat. Seandainya kita dapat membayangkan sekurang-kurangnya *satu* proyek sains alternatif, maka sains modern harus ditolak sebagai suatu proyek yang unik dalam sejarah. Dan sains alternatif juga harus mencakup definisi teknologi yang baru. Padahal teknologi, jika didasarkan seluruhnya pada suatu proyek, hanya dapat ditelusuri kembali pada "proyek" spesies manusia *secara keseluruhan*, dan tidak pada proyek yang dapat diperbaiki secara historis.

Marcuse membayangkan suatu sikap alternatif terhadap alam, namun dari sikap ini tidak dapat diturunkan gagasan tentang teknologi baru. Memperlakukan alam sebagai kawan akrab (subjek) mengandaikan

manusia dapat saling berkomunikasi tanpa paksaan. Padahal pada jaman ini komunikasi di antara manusia sendiri belum bebas dari kekuasaan. Selain itu alam yang sudah terbuka dengan sikap alternatif itu tidak bisa menggantikan kemampuan-kemampuan teknologi yang ada sekarang. Karena teknologi yang ada sekarang bukan hasil proyek-proyek jaman, kelas, dan situasi tertentu yang dapat diperbaiki secara historis, melainkan proyek manusia *secara keseluruhan*. Dalam konteks seperti itu sains modern dari dalam dirinya sendiri harus diarahkan pada kemungkinan penggunaan teknisnya. Untuk fungsi ini seperti juga untuk kemajuan teknis-ilmiah pada umumnya, tidak ada lagi pengganti yang lebih 'manusiawi'.

Marcuse sendiri rupa-rupanya merasa ragu dengan perevolusioneran sains dan teknologi. Karena perevolusioneran ini hanya berarti perubahan kerangka kerja institusional yang tidak dapat menggugat tenaga-tenaga produktif. Struktur kemajuan teknik-ilmiah tetap dipertahankan, hanya nilai-nilai yang mengarahkan berubah. Dari segi politik tenaga-tenaga produktif itu tidak bersalah. Maka menurut Habermas, Marcuse sebenarnya hanya memperbarui definisi klasik tentang hubungan antara tenaga-tenaga produktif dengan hubungan produksi. Konstelasi baru yang hendak diraihinya tidak tercapai.³

Menurut Habermas, Marcuse tidak dapat menguraikan secara tepat arti perkembangan bentuk rasionalitas sains dan teknologi ke dalam "totalitas historis" dunia kehidupan (*Lebenswelt*). Baik Weber maupun Marcuse dianggap Habermas gagal menjelaskannya secara memuaskan. Maka dalam esainya ini Habermas memberikan rumusan baru pada pengertian Weber tentang rasionalisasi dengan menggunakan titik tolak yang lain sehingga dapat pula menjelaskan kritik Marcuse terhadap Weber dan tesis Marcuse tentang fungsi ganda kemajuan teknik-ilmiah (sebagai kekuatan produksi dan ideologi).

2. Titik Tolak Perumusan Kembali Rasionalisasi Weber

Pengertian "rasionalisasi" Weber telah menunjukkan efek-efek balik kemajuan teknik-ilmiah terhadap kerangka kerja institusional masyarakat yang tercakup dalam pengertian "modernisasi". Hal ini dilakukannya dengan menyusun teori mengenai perubahan institusional yang ditimbulkan oleh perluasan sistem-sistem tindakan rasional-bertujuan, seperti yang dilakukan oleh para sosiolog lain dengan menggunakan istilah-istilah berpasangan. Misalnya, status dan kontrak, *Gemeinschaft* dan

Gesellschaft, solidaritas yang mekanis dan yang organis. Habermas menunjuk empat pasangan orientasi nilai alternatif yang menunjukkan perubahan sikap-sikap yang dominan ketika berlangsung peralihan suatu masyarakat dari tradisional menjadi modern, yakni: *affectivity* (afektivitas) lawan *affective neutrality* (netralitas afektif), *particularism* lawan *universalism*, *ascription* (asal-mula) lawan *achievement* (perkembangan), *diffuseness* (penyebaran) lawan *specificity* (pengkhususan).

Untuk merumuskan kembali "rasionalisasi" Weber itu, Habermas mengganti pendekatan subjektif yang digunakan Weber dan para sosiolog Generasi Pertama Teori Kritis dengan kategori yang lain. Titik tolaknya adalah perbedaan yang mendasar antara *kerja* dengan *interaksi*. Mengenai kerja yang disebutnya "tindakan rasional-bertujuan", dia menyatakan:

Dengan 'kerja' atau 'tindakan rasional-bertujuan' saya memahami tindakan instrumental atau pemilihan rasional atau gabungan keduanya. Tindakan instrumental ditentukan oleh aturan-aturan teknis yang berdasarkan pengetahuan empiris. Di dalam setiap hal aturan-aturan itu menyatakan prediksi-prediksi beryang tentang peristiwa-peristiwa fisia atau sosial yang dapat diamati. Prediksi-prediksi ini dapat membuktikan tepat atau keliru. Kemudian pemilihan rasional ditentukan oleh strategi-strategi yang didasarkan atas pengetahuan analitis. Strategi-strategi itu menyatakan tak langsung deduksi-deduksi dari aturan-aturan preferensi (sistem-sistem nilai) dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan; proposisi-proposisi ini baik dideduksikan secara tepat atau keliru. Tindakan rasional-bertujuan menetapkan tujuan-tujuan di bawah kondisi-kondisi yang telah ada. Tetapi sementara tindakan instrumental mengatur sarana-sarana yang cocok atau tidak cocok menurut kriteria pengupasan efektif atas kenyataan, tindakan strategi tergantung hanya pada evaluasi yang tepat atas pemilihan-pemilihan alternatif yang mungkin, yang dihasilkan dari kalkulasi yang ditambahkan oleh nilai-nilai dan norma-norma.¹

Sedangkan mengenai komunikasi yang disamakannya dengan interaksi dia menjelaskan:

Dengan 'interaksi', di lain pihak, saya maksudkan tindakan komunikatif, interaksi simbolis. Tindakan komunikatif itu ditentukan oleh norma-norma konvensional yang mengikat, yang menetapkan harapan-harapan timbal-balik mengenai tingkah-laku dan yang harus dimengerti dan diketahui ukurangk-luangnya oleh dan subjek yang berindak. Norma-norma sosial diberlakukan lewat sanksi-sanksi. Makna dari norma-norma itu diobjektifkan dalam komunikasi lewat bahasa sehari-hari. Sementara keahlian aturan-aturan teknis dan strategi-strategi tergantung pada keahlian proposisi-proposisi yang secara analitis tepat dan secara empiris benar, keahlian norma-norma sosial didasarkan hanya dalam intersubjektivitas saling pemahaman maksud-maksud dan diamanatkan oleh pengetahuan umum mengenai kewajiban-kewajiban.²

Habermas juga menunjukkan bahwa tingkah laku yang menyalahi aturan akan menimbulkan akibat-akibat tertentu baik dalam tindakan rasional-bertujuan maupun dalam tindakan komunikatif. Dia melanjutkan:

Pelanggaran suatu aturan memiliki akibat yang berbeda menurut tipe. Tingkah-laku yang tidak ahli, yang melanggar aturan-aturan teknis atau strategi-strategi yang sah, ditentukan *per se* untuk gagal lewat tidak adanya sukses; 'bukuman' yang terjadi, katakanlah, merupakan penolakan oleh kenyataan. Tingkah laku yang menyimpang, yang melanggar norma-norma konvensional, menimbulkan sanksi-sanksi yang terkait dengan aturan-aturan hanya secara eksternal, yaitu oleh konvensi.³

Untuk memperjelas perbedaan antara kedua tindakan dasar manusia dalam kehidupannya itu Habermas membuat sebuah matriks yang dikutip dalam bagian *Lampiran* tulisan ini. Berdasarkan perbedaan di atas pada tingkat analitis Habermas membedakan secara umum antara:

1. Kerangka kerja institusional suatu masyarakat atau lingkungan hidup sosial budaya; dengan
2. Subsistem-subsistem tindakan rasional-bertujuan yang 'tertanam' di dalamnya.

Dengan perbedaan di atas Habermas mulai merumuskan kembali pengertian Weber tentang "rasionalisasi" masyarakat Barat.

3. Rasionalisasi Weber dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat Barat

Habermas memaparkan proses rasionalisasi mulai dari perjalanan masyarakat tradisional (pra-kapitalis) sampai masyarakat kapitalis awal (liberal). Dia membedakan dua macam kecenderungan rasionalisasi, yakni rasionalisasi dari bawah dan dari atas. Selanjutnya sejak akhir abad ke-19 Habermas melihat dua arah perkembangan di negara-negara kapitalis yang sudah maju, yakni: (1) bertambahnya campur tangan negara demi stabilitas sistem dan (2) munculnya sains dan teknologi sebagai kekuatan produksi yang utama. Habermas merefleksikan kedua kategori itu dalam konteks masyarakat kapitalisme lanjut yang berkembang sampai saat ini.

a. Proses Rasionalisasi dalam Masyarakat Kapitalisme Awal

Menurut Habermas, di dalam masyarakat 'tradisional',⁹ terdapat kaitan yang khusus antara kerangka kerja institusional dengan subsistem-subsistem tindakan rasional-bertujuan. Berdasarkan perekonomian yang bergantung pada pertanian dan pertukangan, masyarakat tradisional hanya mengizinkan pembaharuan teknis dan perbaikan organisasi dalam batas-batas tertentu. Masyarakat tradisional hanya dapat bertahan jika perkembangan subsistem tindakan rasional-bertujuan dijaga di dalam batas-batas legitimasi tradisi-tradisi kebudayaan. Apa yang oleh Marx disebut tenaga-tenaga produktif di dalam masyarakat ini masih dikebawahkan terhadap kerangka kerja institusional, yaitu: penafsiran-penafsiran mitis, religius, dan metafisis terhadap kenyataan. Di sini 'rasionalitas' ditentukan oleh legitimasi-legitimasi mitis, religius, dan metafisis. Karena kekuasaan politis juga ditentukan oleh kesahihan suatu 'rasionalitas' tertentu, legitimasi-legitimasi tradisional ini juga berfungsi memelihara *status-quo* politis.

Perkembangan cara produksi kapitalis menyebabkan perubahan tekanan pada kerangka kerja institusional maupun pada subsistem tindakan rasional-bertujuan. Proses-proses produksi sosial diperlengkapi dengan

mekanisme yang berjalan sendiri dan menjamin pertumbuhan produksi terus-menerus. Penemuan-penemuan penting di bidang teknologi dan strategi, serta institusionalisasi keduanya merupakan penopang pokok cara produksi baru ini. Menurut Habermas, cara produksi kapitalis yang disokong oleh teknologi dan strategi ini merupakan mekanisme yang menjamin perluasan permanen subsistem-subsistem tindakan rasional-bertujuan di dalam masyarakat. Perluasan ini lama kelamaan menjungkirbalikkan 'keunggulan' kerangka kerja institusional tradisional terhadap tenaga-tenaga produktif. Dengan berkembangnya sistem kapitalisme tenaga-tenaga produktif masyarakat atau bidang kerja mengatasi dunia-kehidupan sosial-budaya atau bidang interaksi.

Perluasan subsistem-subsistem tindakan rasional-bertujuan menyebabkan masyarakat mulai mempertanyakan secara kritis kesahihan pandangan dunia tradisional yang terungkap di dalam mitos-mitos, agama dan pandangan metafisis yang menurut Habermas tunduk pada konteks-konteks logika interaksi. Pada awal perkembangan masyarakat modern, 'rasionalitas' yang mematuhi aturan-aturan *language games* dan tindakan komunikatif berbenturan dengan suatu rasionalitas tujuan yang berkaitan dengan tindakan rasional-bertujuan. Di dalam sistem kapitalis, konfrontasi ini dimenangkan oleh rasionalitas tujuan. Hal ini berarti bahwa pandangan dunia tradisional diganti dengan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan tenaga-tenaga produktif sosial. Dengan munculnya cara produksi kapitalis, menurut Habermas, legitimasi bagi kerangka kerja institusional berhubungan secara langsung dengan sistem kerja sosial. Bersamaan dengan itu tatanan hak-hak milik berubah dari *hubungan politis* menjadi *hubungan produksi* yang diatur oleh mekanisme-mekanisme pasar.

Maka keunggulan cara produksi kapitalis atas cara produksi sebelumnya terletak dalam dua hal ini, yaitu:

1. Pembentukan suatu mekanisme ekonomi yang melanggengkan perluasan subsistem-subsistem tindakan rasional-bertujuan.
2. Penciptaan suatu legitimasi ekonomis, sistem kekuasaan dapat disesuaikan pada tuntutan rasionalitas subsistem tindakan rasional-bertujuan.

Perubahan-perubahan dari cara produksi tradisional yang ditentukan oleh hubungan-hubungan politis ke cara produksi kapitalis yang ditentukan oleh mekanisme pasar menimbulkan dua macam rasionalisasi. Terjadi perluasan subsistem tindakan rasional-bertujuan melalui institusionalisasi pasar, tenaga kerja, dan permodalan swasta yang mendorong kemajuan-kemajuan dalam tenaga-tenaga produktif. Dengan perluasan bidang kerja

ini, lama-kelamaan struktur-struktur tradisional yang diwarnai tindakan-tindakan komunikatif diganti dengan hubungan-hubungan yang tunduk pada syarat-syarat 'rasionalitas' instrumental dan strategis. Habermas menyebut proses pertama ini sebagai proses 'rasionalisasi dari bawah'.

Proses kedua yang disebutnya proses 'rasionalisasi dari atas' ditandai oleh *sekularisasi*, yaitu:

1. Lenyapnya kesahihan pandangan dunia dan objektivasi-objektivasi tradisional sebagaimana terungkap di dalam mitos, agama, ritus, metafisika, dan tradisi. Semuanya itu diganti dengan sistem kepercayaan yang subjektif-individual
2. Berubahnya legitimasi-legitimasi tradisional itu menjadi kritik atas dogmatisme tradisi dan penataan kembali unsur-unsur tradisi yang dibebaskan ke dalam bentuk hukum formal kaum borjuis.

Melalui sekularisasi lahir *ideologi-ideologi* dalam arti yang lebih sempit. Ideologi-ideologi itu menggantikan legitimasi-legitimasi kekuasaan tradisional berdasarkan sains modern dan membenarkan diri sebagai hasil kritik ideologi.

Dalam konteks seperti di atas sains modern memiliki suatu fungsi yang khas, yakni menghasilkan pengetahuan yang dari segi *bentuk-nya* dapat dimanfaatkan secara teknis, meskipun pada umumnya kemungkinan penerapannya baru muncul di kemudian hari. Sampai akhir abad ke-19 belum ada saling ketergantungan antara sains dan teknologi sehingga sains belum memberikan percepatan bagi perkembangan teknologi.

b. Proses Rasionalisasi dalam Masyarakat Kapitalisme Lanjut

Pada jaman Marx hubungan-hubungan kemasyarakatan telah mengalami perubahan dari hubungan-hubungan komunikatif ke hubungan-hubungan instrumental-strategis. Marx menyamakan kerangka kerja institusional masyarakat dengan hubungan-hubungan produksi. Kritik atas dogmatisme yang dilakukan oleh kaum borjuis digantinya dengan kritik atas ekonomi-politis. Gagasan-gagasan borjuis tentang kebebasan manusia yang terungkap dalam pasaran bebas dan buruh bebas dikritiknya dengan pedas, karena dalam kenyataan kaum buruh diperalat kaum kapitalis melalui gagasan-gagasan itu dan dalam kenyataan manusia sendiri masih diperbudak oleh mekanisme pasar. Marx menyebut gagasan-gagasan itu sebagai 'ideologis'. Dia menganut 'paradigma kerja' pada taraf epistemologis yang memang menjadi situasi umum pada jaman itu. Masyarakat dikuasai tenaga-tenaga produktif dan kekuasaan politis kehilangan fungsi ekonomisnya. Maka dapat dipahami pula mengapa Marx

kemudian beranggapan bahwa negara, hukum, ideologi, dan bahkan rasio sendiri merupakan superstruktur yang ditentukan oleh tenaga-tenaga produktif dan hubungan-hubungan produksi sebagai basisnya.

Menjelang akhir abad ke-19 di negara-negara kapitalis yang sudah maju terlihat dua arah perkembangan:

1. Bertambahnya campur tangan negara demi stabilitas sistem
2. Bertambahnya saling ketergantungan antara penelitian dan teknologi yang membuat sains dan teknologi menjadi kekuatan produksi yang utama.

Kedua arah perkembangan itu, menurut Habermas, menghancurkan konstelasi antara kerangka kerja institusional dan subsistem tindakan rasional-bertujuan yang telah terjadi dalam kapitalisme liberal. Untuk menganalisis konstelasi yang sudah berubah dalam masyarakat kapitalisme, Habermas memakai tesis dasar Marcuse, bahwa sains dan teknologi saat ini mengambil alih fungsi legitimasi-legitimasi kekuasaan.

Sistem kapitalisme liberal yang mengandalkan mekanisme pasar mengalami disfungsi-fungsionalitas yang membahayakan sistem kapitalisme sendiri. Negara mulai mengadakan intervensi dengan mengatur proses-proses ekonomi secara permanen. Menurut Habermas, jika di dalam sistem kapitalis liberal kerangka kerja institusional didepolitisasikan, dalam sistem kapitalis lanjut justru mengalami repolitisasi. Politik tidak lagi merupakan fenomena superstruktur. Dengan bertambahnya peranan negara dalam masyarakat, legitimasi tidak lagi dapat diturunkan dari hubungan-hubungan produksi sehingga dalam arti tertentu masyarakat membutuhkan legitimasi langsung dari kekuasaan politis seperti pada jaman pra-kapitalis.

Legitimasi dalam masyarakat kapitalisme lanjut ini bisa diperoleh dari *Ersatzprogrammatik* (program-program substitut) yang dikembangkan negara untuk menggantikan ideologi pertukaran bebas kaum borjuis. *Ersatzprogrammatik* ini menghubungkan momen ideologi borjuis tentang prestasi dengan jaminan kesejahteraan minimum, prospek adanya kepastian lapangan kerja, dan penghasilan yang stabil. *Ersatzprogrammatik* merupakan upaya negara mengatasi disfungsi-fungsionalitas dan menghindari resiko yang membahayakan sistem.

Maka, menurut Habermas, legitimasi kekuasaan masyarakat kapitalisme lanjut ditentukan oleh *tujuan-tujuan teknis*, yakni pemecahan masalah-masalah teknis ekonomi masyarakat dan bukan upaya *merealisasikan tujuan-tujuan praktis*. Dalam hal-hal teknis itu, massa tidak dilibatkan sehingga repolitisasi masyarakat sekaligus juga menghasilkan *depolitisasi massa*. Bersamaan dengan itu masalah-masalah

etis-praktis lenyap dalam pengaturan masyarakat. Di sini muncul pertanyaan: mengapa depolitisasi massa dapat diterima sebagai hal yang masuk akal oleh massa rakyat sendiri? Dalam hal ini Habermas melihat bahwa Marcuse dapat memberikan jawabannya, yakni karena teknologi dan sains juga mengambil alih peran ideologi.

Sejak akhir abad ke-19 semakin kuat arah perkembangan kedua yang menandai kapitalisme lanjut, yakni *pengilmuan teknologi*. Ada hubungan timbal-balik yang erat antara perkembangan teknologi dan kemajuan sains modern. Sains, teknologi, dan pemanfaatannya dalam industri terjalin menjadi satu sistem. Dengan demikian teknologi dan sains menjadi kekuatan produksi utama yang membuat *teori nilai lebih* Marx tidak berlaku lagi.

Kemajuan kuasi-otonom sains dan teknologi itu kemudian muncul sebagai variabel independen yang menentukan variabel sistem terpenting dalam masyarakat kapitalisme lanjut, yakni pertumbuhan ekonomi. Muncul pandangan bahwa perkembangan sistem sosial *seolah-olah* ditentukan oleh logika kemajuan teknik-ilmiah. Kekuasaan politis mendasarkan dirinya pada *legitimasi teknokratis*. Saintisme dan positivisme modern di lapangan intelektual menggantikan mitos-mitos pra-kapitalis dan ideologi kebebasan kaum borjuis.

Menurut Habermas, depolitisasi massa dan bangkitnya teknokrasi menyebabkan masyarakat kehilangan pemahaman-dirinya. Unsur tindakan komunikatif dan konsep-konsep interaksi simbolis tidak diperhatikan. Model-model interaksi sosial dan pemahaman-diri masyarakat sendiri diganti dengan model-model pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain, pemahaman-diri terhadap dunia kehidupan sosial diganti dengan reifikasi-diri manusia di bawah kategori-kategori tindakan rasional-bertujuan dan *tingkah-laku adaptif*. Meluasnya tingkah-laku adaptif itu menandakan bahwa lingkup interaksi yang dimediasi secara linguistis ditelan oleh struktur tindakan rasional-bertujuan. Kesadaran jenis baru yang muncul dalam masyarakat kapitalis lanjut ini disebut Habermas '*kesadaran teknokratis*'.

Dengan munculnya *kesadaran teknokratis*¹⁰, lingkaran fungsi dari tindakan rasional-bertujuan tidak hanya lebih unggul dibandingkan dengan kerangka kerja institusional, akan tetapi secara berangsur menyerap tindakan komunikatif itu sendiri. Kerangka kerja institusional masyarakat yang selama ini didukung oleh satu jenis tindakan yang lain, kini *dihisap* oleh subsistem tindakan rasional-bertujuan yang tertanam di dalamnya. Maka kesadaran teknokratis ini di satu pihak, berfungsi sebagai ideologi

bagi politik baru yang diarahkan untuk memecahkan masalah teknis dan mengabaikan masalah-masalah praktis. Di lain pihak, mengakibatkan erosi tersembunyi yang membahayakan tindakan komunikatif.

c. Perjuangan Kelas dan Ideologi dalam Konteks Masyarakat Kapitalisme Lanjut

Akibat kedua arah perkembangan di atas, dua kategori kunci dalam teori Marx, yakni perjuangan kelas dan ideologi, tidak lagi dapat digunakan begitu saja. Habermas menganalisa kembali kedua kategori ini dalam konteks perkembangan masyarakat kapitalisme lanjut.

Marx membuat teori tentang perjuangan kelas sosial berdasarkan cara produksi kapitalis. Menurut Habermas, kapitalisme lanjut yang diatur negara justru berkeinginan menghentikan konflik antar-kelas itu. Lahirnya kapitalisme lanjut merupakan reaksi atas ancaman terhadap sistem yang disebabkan oleh pertentangan kelas yang terbuka. Dengan *Ersatzprogrammatik*-nya sistem ini mau menghindari konflik. Namun sebenarnya dalam struktur masyarakat kapitalis, konflik itu tidak diatasi melainkan dibiarkan dalam keadaan laten.

Akan tetapi, menurut Habermas, dalam masyarakat jenis ini wilayah konflik digeser dari batas kelas ke wilayah kehidupan golongan yang dianak-tirikan. Pergeseran ini sama sekali tidak berarti bahwa potensi konflik yang serius telah dapat diatasi. Kelompok yang dianaktirikan ini bukan kelas-kelas sosial. Secara potensial mereka tidak pernah mewakili massa rakyat. Proses penghilangan hak-hak mereka dan pemelaranan mereka, tidak lagi sama dengan *eksploitasi*, karena sistem tidak hidup dari kerja mereka. Maka kalau mereka mengadakan revolusi, mereka tidak memiliki peluang untuk mencapai sukses seperti yang dimiliki oleh perjuangan kelas, kecuali mereka mengadakan koalisi dengan kelompok-kelompok yang berprivilese.

Di dalam masyarakat kapitalis lanjut, menurut Habermas, kelompok yang serba kekurangan dan yang berprivilese tidak lagi saling berhadapan sebagai kelas-kelas sosio-ekonomis seperti yang dianalisis Marx. Hubungan yang mendasar antar kelas, yang terdapat dalam masyarakat tradisional dan menonjol dalam masyarakat kapitalis liberal, berubah menjadi hubungan tidak langsung. Maka pertentangan antar-kelas yang diturunkan Marx dari hubungan mendasar ini berubah menjadi pertentangan antar-mitra yang diikat oleh hubungan kekuatan, pemerasan ekonomi, dan penindasan politik yang sudah dilembagakan dalam masyarakat kapitalis lanjut. Dalam hal ini komunikasi telah didistorsikan

dan dibatasi sehingga legimasi-legitimasi yang menyelubungi ideologi tidak bisa dipersoalkan lagi. Kemajuan teknis-ilmiah yang menjadi kekuatan produksi menyebabkan perubahan di atas. Kemajuan itu sekarang menjadi dasar legitimasi, walaupun legitimasi baru ini telah kehilangan wujud lamanya sebagai *ideologi*.

Kesadaran teknokratis, di satu pihak menjadi 'kurang ideologis', karena tidak lagi mempunyai kekuatan dari suatu khayalan yang hanya membayangkan pemnuasan kepentingan seperti ideologi yang lama. Namun di lain pihak, sebagai ideologi latar belakang (*hintergrundideologie*) lebih kuat daya tariknya dan lebih jauh daya jangkauannya. Dengan mengesampingkan masalah-masalah praktis, kesadaran teknokratis tidak hanya membenarkan kepentingan kelas tertentu untuk menindas kelas yang lain, namun mencakup kepentingan emansipatoris seluruh umat manusia. Kesadaran teknokratis ini lebih sulit disentuh oleh refleksi, karena tidak lagi *semata-mata* memperjuangkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan bersembunyi di balik kepentingan emansipatoris, kesadaran ini menguasai seluruh masyarakat.

Menurut Habermas, hanya dalam dua hal ideologi lama dan baru berbeda satu sama lain. Pertama, kesadaran teknokratis tidak dapat bertumpu lagi pada suatu represi kolektif dengan cara yang sama seperti ideologi sebelumnya. Hubungan modal yang terikat pada suatu cara distribusi politis yang menjamin loyalitas, sekarang tidak lagi menggunakan cara pemerasan dan penindasan yang tanpa koreksi. Kedua, ideologi baru melepaskan kriteria-kriteria pembenarannya dari organisasi kehidupan sosial, lalu mengikatnya kepada fungsi-fungsi suatu sistem tindakan rasional-bertujuan. Dalam ideologi baru aturan-aturan normatif interaksi pada umumnya didepolitisasikan.

Kesadaran teknokratis mencerminkan penindasan dimensi etis manusia yang terkait langsung dengan kehidupan sosial politisnya. Usaha-usaha melenyapkan dimensi etis itu paling tampak dalam cara berpikir positivistic masyarakat kapitalis lanjut yang memuncak dalam bentuk-bentuk positivisme modern dan ilmu-ilmu sosial yang didepolitisasikan. Habermas berpendapat depolitisasi massa dan depolitisasi pemikiran masyarakat kapitalis lanjut merupakan hasil objektivasi diri manusia ke dalam kategori-kategori tindakan rasional-bertujuan dan tingkah-laku adaptif. Kesadaran teknokratis berwatak ideologis. Habermas menunjukkannya pada *penghapusan perbedaan antara yang praktis dan yang teknis*. Dengan menghapus perbedaan itu, *kepentingan-kepentingan praktis* manusia ditundukkan di bawah *kepentingan-kepentingan teknis*.

Berikut ini skema rekonstruksi rasionalisasi di dalam sejarah masyarakat Barat menurut Habermas:

	Masyarakat Tradisional	Masyarakat Kapitalisme awal	Masy. Kapitalisme lanjut
rasionalisasi dari atas	mitos, agama metafisika,	ideologi borjuis	kesadaran teknokratis
rasionalisasi dari bawah	kerangka kerja institusional	substansi tindakan rasional bertujuan	substansi tindakan rasional bertujuan
bentuk kekuasaan	kekuasaan politis	kekuasaan pasar (ekonomi)	kekuasaan teknokratis

4. Konsep Rasionalisasi yang Sewajarnya menurut Habermas

Melalui relativisasi penggunaan konsep perjuangan kelas dan ideologi Marx di atas, Habermas menunjukkan bahwa kerangka kategori yang dikembangkan Marx dalam asumsi-asumsi dasar materialisme historis menuntut perumusan yang baru. Kalau Marx mendasarkan teorinya pada hubungan antara tenaga-tenaga produktif dengan hubungan-hubungan produksi,¹¹ Habermas mengusulkan untuk menggantinya dengan hubungan yang lebih abstrak antara kerja dan interaksi. Dia menganggap hubungan yang terakhir ini lebih merekonstruksikan tahap-tahap sosio-budaya sejarah manusia.

Habermas kemudian mengulangi rekonstruksi proses rasionalisasi dengan menguraikan secara singkat hubungan kerja dan interaksi sejak jaman primitif. Rekonstruksi ini dilakukan sampai tahap munculnya kesadaran teknokratis yang merupakan hasil 'rasionalisasi dari atas'. Kesadaran teknokratis merupakan ideologi pengganti ideologi borjuis yang mendasarkan diri pada mekanisme pasar bebas dan tenaga-tenaga produktif masyarakat yang dapat berjalan sendiri. Ideologi borjuis tentang kebebasan individu dan kebebasan rasio yang dimungkinkan oleh mekanisme pasar merupakan pengganti legitimasi-legitimasi mitis, religius, dan metafisis dalam masyarakat pra-kapitalis. Dalam arti inilah proses rasionalisasi bersifat ambigu. Adorno dan Horkheimer menganggapnya sebagai dialektika pencerahan, sedang oleh Marcuse dianggap sebagai ideologisasi sains dan teknologi. Ideologi yang satu menggantikan ideologi yang lain.

Pola perkembangan sosio-budaya manusia sejak semula ditentukan oleh suatu pertumbuhan kemampuan penguasaan teknis terhadap kondisi-kondisi

lahir eksistensi di satu pihak, dan penyesuaian yang sedikit banyak pasif terhadap kerangka kerja institusional pada perkembangan subsistem-subsistem tindakan rasional-bertujuan di lain pihak. Tindakan rasional-bertujuan mencerminkan bentuk *penyesuaian aktif* yang membedakan pelestarian-diri (*Selbsterhaltung*) kolektif subjek-subjek sosial dari pelestarian sifat (*Arterhaltung*) spesies-spesies hewan. Sebaliknya, entah secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh teknologi dan strategi baru, perubahan-perubahan kerangka kerja institusional akan mengikuti pola *penyesuaian pasif*. Perubahan-perubahan ini bukan merupakan akibat suatu tindakan rasional-bertujuan yang direncanakan dan hasilnya bisa dikontrol, melainkan merupakan hasil suatu perkembangan alamiah.

Dari pola perkembangan yang digambarkan Habermas di atas, terlihat bahwa proses rasionalisasi masyarakat Barat berjalan timpang antara penyesuaian aktif di satu pihak, dengan penyesuaian pasif di lain pihak. Namun ketimpangan ini tidak dapat disadari selama dinamika perkembangan kapitalis ditutup-tutupi oleh ideologi-ideologi kaum borjuis. Marx berjasa besar membawa ketimpangan itu masuk ke dalam kesadaran umum melalui kritiknya yang tajam terhadap ideologi-ideologi kaum borjuis.

Habermas mengutip pernyataan terkenal Marx bahwa *manusia membuat sejarah sendiri, tapi tidak dengan kehendak dan kesadaran*. Tujuan kritik Marx adalah untuk mengubah penyesuaian sekunder kerangka kerja institusional menjadi penyesuaian aktif dan untuk menempatkan perubahan struktural masyarakat itu sendiri di bawah kontrol manusia. Hal ini akan mengatasi hubungan yang mendasar dari segala sejarah sebelumnya dan menyelesaikan pembentukan diri umat manusia: akhir pra-sejarah. Namun gagasan ini bermakna ganda.

Menurut Habermas, dapat dipastikan bahwa Marx memandang masalah *membuat sejarah dengan kehendak dan kesadaran* sebagai suatu tugas penguasaan *praktis* atas proses perkembangan masyarakat yang hingga kini tidak dapat dikontrol. Akan tetapi orang lain memahaminya sebagai tugas *teknis*. Dengan jalan merekonstruksikan masyarakat menurut pola subsistem-subsistem tindakan rasional-bertujuan dan perilaku adaptif yang dapat diatur secara otomatis, mereka ingin menempatkan masyarakat di bawah kontrol *dengan cara yang sama* seperti yang mereka lakukan terhadap alam.

Habermas memperlihatkan bahwa di masa depan daftar teknik-teknik pengendalian masyarakat itu akan sangat bertambah panjang dengan mengemukakan daftar penemuan-penemuan teknik yang mungkin terjadi

pada abad ke-21 yang dibuat Herman Kahn. Dia mau menunjukkan suatu lingkup kemungkinan-kemungkinan di masa depan untuk melepaskan perilaku manusia dari sistem-sistem norma yang diikat oleh *language games* dan melalui penggunaan pengaruh fisis dan psikologis, mengintegrasikannya ke dalam subsistem-subsistem tipe manusia-mesin yang dapat diatur secara otomatis. Dengan demikian wilayah-wilayah kesadaran lama yang telah bertumbuh dalam komunikasi bahasa pergaulan akan mengering. Menurut Habermas objektivasi diri manusia agaknya telah berakhir dalam suatu alienasi yang direncanakan - *manusia membuat sejarahnya sendiri dengan kehendak, tapi tanpa kesadaran*.

Mengenai perkembangan proses rasionalisasi yang timpang itu, Habermas tidak mencetuskan suatu utopia atau bersikap pesimis terhadap perkembangan masyarakat. Dia hanya memberi suatu sumbangan bagi konsep rasionalisasi yang sewajarnya terjadi berdasarkan perbedaan dua tindakan dasar manusia.¹²

Selanjutnya, Habermas memberikan ciri-ciri yang lebih jelas mengenai 'rasionalisasi dalam bidang interaksi':

Suatu rasionalisasi norma-norma sosial, sesungguhnya, dapat diartikan oleh suatu pengurangan tingkat perindasan (yang pada taraf struktur kepribadian akan meningkatkan toleransi rata-rata dari ambivalensi di hadapan konflik-konflik peran), suatu pengurangan tingkat kekerasan (yang akan melipatgandakan kesempatan-kesempatan pemeliharaan diri yang secara individual bersifat stabil dalam interaksi sehari-hari), dan akhirnya kepada suatu tipe pengendalian tingkah-laku yang mengijinkan jarak peranan dan penerapan norma-norma yang fleksibel yang cenderung diinternalisasikan dengan baik, akan mudah menerima refleksi.¹³

Habermas berpendapat bahwa rasionalisasi dalam bidang interaksi tidak sama dengan rasionalisasi dalam bidang kerja. Rasionalisasi di dalam bidang interaksi itu pada dirinya tidak akan membawa perbaikan fungsi sistem-sistem masyarakat, tetapi akan memperlengkapi anggota masyarakat dengan kesempatan bagi emansipasi lebih jauh lagi dan proses individuasi yang progresif.

Penutup

Setelah mengikuti rangkaian argumentasi Habermas secara panjang lebar di atas, kini saatnya kita kembali pada pokok pembicaraan, yakni apa yang telah dilakukan Habermas sebagai seorang pembaharu teori kritis. Dalam bagian penutup ini akan dipaparkan tesis Habermas sendiri dalam menanggapi rasionalisasi Weber yang dikritik secara tajam oleh Marcuse. Untuk memperjelas hal ini terlebih dulu akan dikemukakan tesis Weber dan Marcuse sendiri tentang hal tersebut.

Weber sebagai sosiolog mengartikan rasionalisasi secara empiris dalam dua arti. Pertama, perluasan bidang-bidang sosial yang berada di bawah norma-norma pengambilan keputusan yang rasional. Kedua, industrialisasi kerja sosial yang mengakibatkan norma-norma tindakan instrumental memasuki bidang hidup lain. Singkatnya, rasionalisasi adalah proses tindakan rasional-bertujuan menjadi berlaku umum.

Kritik Marcuse terhadap Weber adalah bahwa di dalam rasionalisasi itu, kekuasaan melestarikan dan memperluas dirinya. Perkembangan sains dan teknologi telah menjadi ideologis, karena kekuasaan politis yang sedang meluas dan mengabsorpsi segala kebudayaan memperoleh legitimasinya tidak hanya melalui teknologi, melainkan sebagai teknologi. Menurut Marcuse, dalam masyarakat kapitalisme lanjut, saat ini sains dan teknologi menjadi ideologi.

Habermas tidak setuju dengan pendapat Marcuse bahwa teknologi menjadi ideologi. Teknologi sebenarnya merupakan salah satu bentuk rasionalisasi yang dibutuhkan manusia. Proses rasionalisasi dalam masyarakat Barat berjalan timpang karena rasionalisasi dalam bidang kerja yang paling nampak berkembang secara pesat. Sedangkan rasionalisasi dalam bidang interaksi kurang berkembang, bahkan mau digantikan dengan rasionalisasi dalam bidang kerja. Letak watak ideologis 'kesadaran teknokratis' ini adalah penghapusan pembedaan antara rasionalisasi dalam bidang interaksi (yang praktis) dengan rasionalisasi dalam bidang kerja (yang teknis dan strategis).

Jadi tesis Habermas tentang rasionalisasi adalah bahwa proses rasionalisasi di dalam masyarakat Barat berjalan timpang. Masyarakat Barat hanya menekankan rasionalisasi dalam bidang kerja yang memuncak pada kesadaran teknokratis. Kesadaran teknokratis itu tidak ideologis 'pada dirinya sendiri' seperti dikatakan Marcuse, melainkan ideologis karena menutup-nutupi rasionalisasi dalam dua bidang yang tidak sama. Maka Habermas mengusulkan pengembangan rasionalisasi dalam bidang interaksi.¹⁴

Catatan akhir:

1. Lih. F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Yogyakarta: 1990), hal. 60.
2. Reifikasi adalah pandangan Lukács tentang adanya gejala hubungan-hubungan antar manusia yang nampak sebagai hubungan antara benda-benda. Pandangan-pandangan Lukács mengenai reifikasi merupakan perpaduan antara analisis Weber tentang proses rasionalisasi dan kritik ekonomi-politik Marx yang menggunakan kerja sebagai paradigma. Lukács mengaitkan proses rasionalisasi itu dengan reifikasi. (Lih. F. Budi Hardiman (1990), hal. 41)
3. *Ibid.*, hal. 92-93.
4. Lih. J. Habermas, *Rasa dan Teknologi sebagai Ideologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 49.
5. Habermas mengutip rumusan Marcuse, "Orang masih dapat berikhtir bahwa permesinan dunia (*universum*) teknologi 'pada dirinya sendiri' tidak mempunyai tujuan-tujuan politik - hanya dapat mempercepat atau menghambat kemajuan suatu masyarakat ... Akan tetapi, jika teknologi menjadi suatu bentuk produksi material yang menyeluruh, maka teknologi melukiskan suatu kebudayaan secara keseluruhan; merancang suatu totalitas historis - sebuah dunia." (Habermas (1974), hal. 89-90; (1990), hal. 58-57)
6. Habermas (1974), hal. 91-92; (1990), hal. 59-60.
7. Habermas (1974), hal. 92; (1990), hal. 60-61.
8. Habermas (1974), hal. 92; (1990), hal. 61.
9. Yang dirafkan dengan masyarakat 'tradisional' oleh Habermas di sini adalah semua sistem masyarakat yang pada umumnya telah memenuhi kriteria-kriteria kebudayaan tinggi (peradaban) yang berbeda dengan bentuk masyarakat primitif karena: a) memiliki suatu kekuasaan pemerintahan yang dipusatkan; b) masyarakatnya sudah terbagi-bagi dalam kelas-kelas socio-ekonomis; c) memiliki suatu pandangan-dunia yang netral untuk memberikan legitimasi yang efektif kepada kekuasaan. (Lih. Habermas (1974), hal. 94; (1990), hal. 64)
10. Habermas memperlihatkan bagaimana kesadaran teknokratis masuk dalam subjektivitas manusia: "Masyarakat-masyarakat industri yang paling maju nampaknya seperti model kontrol perilaku yang lebih diarahkan oleh rangsangan-rangsangan dari luar daripada oleh norma-norma. Kontrol secara tidak langsung melalui rangsangan-rangsangan yang dibuat-buat telah meningkat, khususnya dalam bidang kebebasan subjektif ... Peningkatan perilaku adaptif hanyalah gejala permukaan dari penghancuran bidang interaksi melalui bahwa oleh struktur tindakan rasional-bertujuan. Hal ini sejajar secara subjektif dengan lenyapnya perbedaan antara tindakan rasional-bertujuan dan interaksi kesadaran manusia sendiri, dan tidak hanya dari kesadaran sains. Kekuatan ideologi kesadaran teknokratis ini terbukti dari kemampuannya menatap-menapi perbedaan ini." (Habermas (1974), hal. 107; (1990), hal. 83)
11. Menurut Marx, tenaga-tenaga produktif terdiri dari alat kerja, bahan, dan pengalaman produksi atau teknologi. Sedangkan hubungan produksi adalah hubungan antar manusia yang bekerja sebagai akibat cara kerja tertentu. Tenaga-tenaga produktif bersifat revolusioner, sedangkan hubungan produksi bersifat konservatif.
12. Habermas menjelaskan, "Melampaui semua itu, menjadi jelaslah mengenai latar belakang bahwa dua konsep rasionalisasi perlu dibedakan. Pada taraf sub-sistem-sub-sistem tindakan rasional-bertujuan, kemajuan teknis-ilimiah telah mendorong reorganisasi institusi-institusi sosial dan sektor-sektor sosial, dan mengharuskannya pada suatu skala yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Akan tetapi proses perkembangan kekuatan-kekuatan produktif ini dapat menjadi suatu potensi bagi pembatasan jika dan hanya jika proses ini tidak menggantikan rasionalisasi pada taraf yang lain. *Rasionalisasi pada taraf kerangka kerja institusional* dapat terjadi hanya dengan penertarikan interaksi simbolis itu sendiri, yaitu melalui *penyempitan ruang-rangsangan dalam komunikasi*. Diskursi yang bebas hambatan, yang bersifat publik bebas dari pengusutan, dari kecacokan dan hal yang dihindarkan dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengorientasikan tindakan dalam terang tanggapan-tanggapan sosial budaya dari sub-sistem-sub-sistem tindakan rasional-bertujuan yang sedang berkembang - komunikasi seperti itu pada semua taraf proses pengambilan keputusan yang direfleksikan dan yang politis merupakan satu-satunya sarana di mana segalanya seperti 'rasionalisasi' itu mungkin."
13. Habermas (1974), hal. 119; (1990), hal. 99-100.

Lampiran:

**PERBEDAAN KERANGKA KERJA INSTITUSIONAL (INTERAKSI)
SUBSISTEN TINDAKAN RASIONAL-BERTUJUAN (KERJA) MENURUT HABERMAS**

	Kerangka kerja Institusional: Interaksi-simbolis	Subsistem tindakan rasional-bertujuan (instrumental dan strategis)
aturan-aturan yang mengorientasikan tindakan	norma-norma sosial	aturan-aturan teknis
taraf definisi	bahasa sehari-hari yang dilaksanakan secara inter-subj.	bahasa yang bebas konteks
mekanisme-mekanis- me kemahiran	internalisasi peran	mempelajari keda- kapan dan keahlian
fungsi mesin tindakan	pemeliharaan pre- nata (kepatuhan pada norma-norma atas dasar desakan timbal balik)	pemecahan masalah (pencapaian tujuan ditentukan dalam relasi-relasi tu- juan)
sanksi-sanksi terhadap pelang- garan aturan	hukuman atas dasar sanksi-sanksi kon- vensional (kegagal- an lawan sterilitas	ketidakefektifan : kegagalan dalam kenyataan
"rasionalisasi"	emansipasi, indivi- dualisasi, perluasan komunikasi bebas penguasaan	perkembangan te- knologi-teknologi pro- duktif; perluasan kontrol teknis

Sumber: Habermas (1974), hal. 93; asar (1990), hal. 63

APA ARTI KRISIS DEWASA INI? MASALAH-MASALAH LEGITIMASI DALAM KAPITALISME LANJUT

Josephus Edi Mulyono

Pengantar

Pokok masalah Habermas dalam esai kali ini adalah apakah kapitalisme lanjut mengikuti pola perkembangan penghancuran-diri yang sama seperti kapitalisme klasik yang bersifat kompetitif; atau prinsip organisasi kapitalisme lanjut telah berubah demikian besar sehingga proses akumulasi tidak lagi melahirkan problem-problem yang mengancam eksistensi-nya.

Teks ini dibagi dalam 4 bagian, (1) Penjelasan Habermas tentang krisis dan masalah legitimasi dalam kapitalisme lanjut; (2) Deskripsi masyarakat kapitalisme lanjut, dan (3) masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat kapitalisme lanjut. Ditunjukkan pula pada bagian ini tendensi-tendensi krisis yang mungkin terjadi pada masyarakat itu; (4) Diskusi Habermas sekitar penjelasan terhadap tendensi krisis itu.

1. Konsep Dasar Krisis

Menurut ilmu kedokteran, krisis berarti fase suatu penyakit. Pada fase itu diputuskan apakah organisme mempunyai daya-daya penyembuhan yang cukup bagi proses kesembuhannya. Proses krisis akibat suatu penyakit tampak sebagai sesuatu yang objektif (dapat diamati dan diukur) sehingga kesadaran si pasien tidak berperanan di sini. Bagaimana si pasien merasa dan bagaimana ia mengalami penyakitnya akhirnya merupakan gejala-gejala dari peristiwa yang tidak mempengaruhi dirinya.

Habermas menyadari bahwa suatu krisis tidak dapat dipisahkan dari sudut batin si korban. Pasien mengalami ketidak-berdayaannya terhadap objektivitas penyakit hanya karena dirinya merupakan suatu subjek yang terhukum pada pasivitas dan untuk sementara tidak mampu menjadi subjek dengan segala kekuatan penuhnya. Kalau krisis terpecahkan, subjek yang terjatuh dalam ketidakberdayaan dibebaskan.

Pada abad-18, gambaran pemikiran krisis itu memasuki teori sosial evolusioner abad-19. Marx merupakan orang pertama yang mengembangkan suatu konsep sosiologis tentang krisis sistem. Dengan latar belakang pemikiran konsep sosiologis tentang krisis sistem itulah Habermas berbicara mengenai krisis sosial atau ekonomi.¹

Ada dua konsep dasar yang dibedakan oleh Habermas mengenai krisis masyarakat, yaitu sistem dan dunia kehidupan (*life-world*). Konsep sistem mengingatkan kita pada teori sistem Parsons. Menurut Parsons, sistem adalah konsep yang menunjuk pada saling ketergantungan antar bagian-bagian, komponen-komponen, proses-proses, dan sekaligus menunjukkan tipe saling ketergantungan antara suatu kompleksitas dan lingkungan sekitarnya².

Kategori dalam masyarakat menurut pendekatan sistem adalah *integrasi sistem*. Sistem untuk masyarakat adalah sistem pengendalian diri. Krisis muncul ketika ada masalah yang mengancam eksistensi sistem itu. Struktur sistem sosial hanya menyediakan pemecahan yang tidak mencukupi dari pada yang diperlukan. Krisis dilihat secara objektivistik sebagai gangguan-gangguan tetap pada integrasi sistem. Krisis tidak disebabkan oleh perubahan-perubahan yang kebetulan, tetapi karena tuntutan-tuntutan yang secara struktural melekat pada sistem. Namun tuntutan itu bertentangan dengan sistem dan tidak dapat diintegrasikan dengan sistem tersebut.

Habermas melihat ada pendekatan lain untuk memahami masyarakat dan melengkapi pendekatan sistem. Pendekatan sistem memiliki kesulitan menentukan batas-batas dan apa yang tetap bagi sistem sosial sehingga diketahui struktur essensialnya dan kapan terjadi perubahan yang mengancam eksistensi identitas sosial itu. Pendekatan itu memahami masyarakat sebagai dunia-kehidupan (*Lebenswelt* atau *life-world*). Habermas tidak mengutarakan definisi tertentu. Kita dapat meminjam ungkapan Huxley dalam '*Literature und Wissenschaft*' (1963, hal.14) yang dikutip Habermas, yaitu dunia yang digeluti oleh sastra.³

Pendekatan di atas dikategorikan sebagai *integrasi sosial*. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dunia kehidupan adalah dunia individu yang hidup dengan berbagai perbedaan dan persamaan. Untuk mencapai integrasi sosial itu diperlukan konsensus. Integrasi sosial berkaitan dengan sistem institusi. Di dalam sistem itu subjek-subjek yang berbicara dan bertindak berhubungan secara sosial, misalkan dengan bahasa. Krisis terjadi jika integrasi sosial terancam sehingga mengakibatkan adanya anomie. Dari sudut pandang masyarakat sebagai suatu sistem, masalah klaim validitas tidak dipermasalahkan. Sistem sosial mengendalikan

dirinya sendiri. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat sebagai dunia-kehidupan, tidak ada masalah pengendalian. Masalah sosial harus diselesaikan dengan *discourse*. Individu-individu yang berbeda satu sama lain berdiri sejajar.

Teori sistem mengkonsepkan sistem sosial dari sudut pandang pusat pengendalian. Maka dalam masyarakat yang terdeferensiasi, sistem politik mendapatkan posisi pusat, mengatasi sistem ekonomi dan sistem sosial-budaya. Sistem politik-administrasi menerima pemasukan pajak dari sistem ekonomi dan sekaligus mengendalikan sistem ekonomi. Demikian pula, sistem politik-administrasi membutuhkan kesetiaan massa yang bersumber dari sistem sosial-budaya, dan mendistribusikan kekayaan sosial.

Habermas mensinyalir dalam masyarakat ada dua macam '*goal-values*' (nilai-nilai yang ingin dicapai oleh sistem sosial yang berasal dari nilai-nilai kultur tradisi yang tetap dan yang berperan sebagai tuntutan-tuntutan integrasi sistem non-normatif). Hubungan keduanya dirasakan kurang dianalisa dalam Ilmu Sosial.

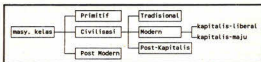
Bagi Habermas, perubahan sosial memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Perubahan itu ditentukan oleh prinsip organisasi yang membatasi kemungkinan-kemungkinan perubahan keadaan sosial secara abstrak. Prinsip organisasi adalah patokan-patokan abstrak yang timbul sebagai sifat-sifat penting dalam tiap tahap evolusi dan tiap tahap evolusi mencirikan tingkat perkembangan yang baru. Tanpa mengubah identitas masyarakat, setiap tahap evolusi masyarakat mengandung prinsip organisasi baru. Prinsip organisasi menentukan mekanisme belajar. Pada akhirnya, mekanisme itu menentukan tingkat perkembangan kekuatan produksi, tingkat variasi sistem interpretatif yang menjaga identitas dan menentukan batas-batas kelembagaan untuk perluasan kemampuan pengendalian.

2. Sistem Sosial dan Prinsip Organisasi

Ada tiga ciri sistem sosial yang menjadi asumsi dasar Habermas kalau berbicara tentang Prinsip Organisasi. (1) Sistem-sistem sosial berinteraksi dengan lingkungan produksi (sumbangan alam objektif) dan sosialisasi (sumbangan alam subjektif) melalui medium tuturan. Medium itu menyangkut kebenaran dan norma-norma yang membutuhkan pembenaran. (2) Perubahan dalam '*goal-value*' sistem sosial merupakan kondisi bagi keadaan kekuatan-kekuatan produksi dan tingkat otonomi sistem. Namun variasi '*goal-value*' dibatasi oleh kemajuan cara atau pola berpikir di dunia

yang tidak mengindahkan tuntutan-tuntutan integrasi sosial. Individu-individu dalam masyarakat membentuk lingkungan subjektif yang berbeda dari sudut pandang pengendalian. (3) Tingkat perkembangan suatu masyarakat ditentukan oleh kemampuan belajarnya. Apakah masalah-masalah teoretis-teknis dan praktis dibedakan? Apakah proses belajar secara diskursif dapat terjadi dalam masyarakat itu?

Ketiga ciri di atas melatarbelakangi Habermas mengilustrasikan tiga macam pembentukan masyarakat sebagai berikut:



Tiga prinsip organisasi yang menjadi ilustrasi Habermas adalah prinsip organisasi dalam pembentukan Masyarakat Primitif, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Kapitalis Liberal.

Pertama, inti kelembagaan prinsip organisasi dalam pembentukan masyarakat primitif adalah hubungan kekerabatan. Prinsip organisasi dibentuk oleh peran-peran primer yang ditentukan berdasarkan umur dan seks. Struktur-struktur keluarga sekaligus menjamin integrasi sosial dan integrasi sistem. Keduanya belum dibedakan dalam masyarakat primitif. Tidak ada motivasi untuk memproduksi barang melebihi apa yang dibutuhkan, sehingga juga tidak akan ada eksploitasi atas kekuatan produksi. Tipe krisis yang terjadi adalah krisis akibat perubahan dari luar yang merusak identitas kekeluargaan dan kesukuan. Misalnya ketergantungan antar etnis lewat pertukaran ekonomi, perang, penaklukan.

Kedua, prinsip organisasi masyarakat tradisional adalah kekuasaan kelas politik atau dominasi kelas. Peran-peran primer dalam kekerabatan tidak lagi mengendalikan, dan diganti dengan kekuasaan negara dan kelas-kelas sosio-ekonomi sebagai fungsi-fungsi sentral. Sudah ada pembedaan fungsi yang memunculkan subsistem-subsistem politik, ekonomi, sosial-budaya. Peranan semua subsistem itu adalah untuk integrasi sistem dan integrasi sosial. Subsistem membutuhkan legitimasi untuk mengatur sarana produksi dan pelaksanaan kekuasaan. Dan legitimasi berhadapan dengan justifikasi maupun sistem moral.

Tipe krisis yang mungkin terjadi adalah krisis identitas yang ditentukan dari dalam masyarakat itu sendiri. Pemilikan sarana-sarana produksi melembagakan hubungan kekuasaan yang selanjutnya mengancam integrasi sosial. Krisis disebabkan oleh pertentangan antar kepentingan. Dalam masyarakat tradisional, sistem kerja sosial didasarkan pada kelas dan peningkatan kekuatan produksi dapat dilakukan melalui eksploitasi.

Kontradiksi internal penyebab krisis berada di antara klaim validitas sistem-sistem norma dan justifikasi yang tidak dapat mengijinkan eksploitasi. Krisis berasal dari problem pengendalian yang membutuhkan menguatnya otonomi melalui represi. Represi menyebabkan hilangnya legitimasi, yang berakhir dengan perjuangan kelas. Akibatnya, perjuangan kelas mengancam integrasi sosial dan dapat membawa perubahan sistem politik serta menyediakan dasar-dasar legitimasi yang baru yaitu identitas kelompok baru.

Ketiga, Prinsip Organisasi masyarakat kapitalis liberal adalah kekuasaan kelas yang tidak bersifat politis, yaitu hubungan kerja upah dan modal. Munculnya dunia perdagangan yang bebas dari negara menyebabkan masyarakat sipil tidak berperan banyak dalam sistem politik-ekonomi. Inilah depolitisasi hubungan kelas dan anonimasi dominasi. Negara menjadi negara rasional modern yang berhubungan secara komplementer dengan perdagangan pasar yang punya logikanya sendiri. Secara eksternal, negara melalui sarana politik menjamin integritas teritorial dan sifat kompetitif ekonomi dalam negeri. Secara internal, negara memelihara kondisi produksi secara umum, yang memungkinkan proses realisasi modal yang diatur pasar. Pertukaran ekonomi menjadi medium pengendali yang dominan.

Ciri khas masyarakat ini adalah fluktuasi kemakmuran, krisis, dan depresi. Pertentangan kepentingan tidak langsung nyata dalam konflik kelas, tetapi terungkap dalam interupsi proses akumulasi, dalam bentuk problem pengendalian. Tipe krisis untuk masyarakat kapitalis liberal adalah krisis sistem. Krisis ini nampak dalam bentuk problem-problem pengendali ekonomi yang tidak terpecahkan. Di sini bahaya yang mengancam integrasi sistem merupakan ancaman langsung untuk integrasi sosial. Krisis masyarakat kapitalis liberal adalah krisis sosial karena tugas integrasi sosial ada pada sistem pengendalian oleh pasar yang tidak politis. Unsur-unsur tradisi dalam masyarakat tradisional efektif untuk legitimasi, kini tergantung pada ideologi yang dibangun ke dalam basis ekonomi, yaitu pertukaran yang seimbang.

Krisis dalam masyarakat ini bersifat endemik karena masalah-masalah pengendalian yang tak terpecahkan begitu membahayakan integrasi sosial. Pengalihan tugas integrasi sosial pada subsistem ekonomi menjadi mungkin karena dalam masyarakat kapitalis liberal hubungan kelas dilembagakan lewat pasar tenaga kerja dan didepolitisir. Menurut Habermas pasar memiliki dua fungsi; sebagai mekanisme pengendali sistem kerja sosial yang dikontrol oleh uang melembagakan hubungan kekuasaan antara pemilik sarana produksi dan pekerja upahan; dan sebagai hubungan pertukaran dalam bentuk kontrak kerja swasta dan menghisap nilai lebih, berfungsi mengakumulasi kapital.

3. Gambaran Struktur Masyarakat-masyarakat Kapitalisme Lanjut

Ada dua tahap kapitalisme yaitu kapitalisme liberal dengan kompetisi sebagai ciri khasnya, dan kapitalisme lanjut. Kapitalisme liberal berakhir ketika negara melakukan intervensi dalam sistem perekonomian. Kemudian kapitalisme liberal digantikan oleh bentuk kapitalisme lanjut yang menekankan proses konsentrasi ekonomi dengan pendirian perusahaan nasional dan multinasional. Negara intervensionis mengisi kekosongan fungsi dalam pasar.

a. Sistem Ekonomi

Habermas berpendapat bahwa sistem ekonomi masyarakat kapitalisme lanjut memberi peluang pada swasta (privat)⁴. Produksi berorientasi ke strategi pasar oligopolis yang diatur oleh sistem kompetisi. Di bidang publik muncul industri-industri besar yang mampu mengendalikan pasar secara bebas. Mereka adalah perusahaan yang secara langsung dikontrol oleh pemerintah maupun firma swasta yang hidup dari kontrak-kontrak pemerintah.

Ciri lainnya adalah bahwa sektor-sektor monopolistik dan sektor publik didominasi industri padat modal (*industri-capital-intensif*). Di sektor ini industri berhadapan dengan serikat-serikat pekerja. Sedang sektor kompetitif didominasi industri padat karya (*industri-labor-intensif*) sehingga buruh tidak terorganisir dengan baik dan tingkat upahnya berbeda.

b. Sistem Administrasi

Menurut Habermas, aparat negara selain mengatur seluruh siklus ekonomi dengan perencanaan global, juga memperbaiki kondisi-kondisi penggunaan modal. Ada langkah-langkah pengelolaan perpajakan dan

keuangan untuk mengatur investasi dan seluruh permintaan kredit atau pinjaman. Semua langkah itu digunakan negara sebagai suatu sistem preferensi. Sistem ini didasarkan pada kompromi antara imperatif-imperatif yang bersaing, yaitu: pertumbuhan yang mantap, stabilitas nilai uang, kerja penuh, keseimbangan perdagangan. Perencanaan global merekayasa syarat-syarat minimal keputusan-keputusan yang dibuat perusahaan swasta. Hal itu dijalankan untuk mengoreksi mekanisme pasar dengan menetralkan akibat-akibat samping yang mengganggu.

Negara mencangkokkan mekanisme pasar ketika pemerintah menciptakan dan memperbaiki syarat-syarat penggunaan surplus modal yang terkumpul. Negara menjalankannya lewat memperkuat kemampuan bersaing, menambah konsumsi persenjataan, secara politis mengelola modal sektor-sektor yang diabaikan oleh pasar otonom, memperbaiki infrastruktur materiil (pendidikan dan transportasi) dan immateriil (riset ilmiah), memajukan produktivitas tenaga kerja manusia, membayar biaya-biaya sosial dan akibat-akibat produksi swasta (pengangguran, kesejahteraan sosial, kerusakan-kerusakan ekologis).

c. Sistem Legitimasi

Karena lemahnya fungsi pasar, negara campur tangan di bidang produksi. Campur tangan itu membutuhkan legitimasi⁵ yang makin lama makin lebih besar. Apalagi nilai universal ideologi borjuis telah membuat hak-hak sipil (misalkan: hak mogok) menjadi universal. Di luar pemilu, legitimasi hanya dapat diperoleh dalam keadaan luar biasa dan sifatnya sementara. Masalah-masalah yang muncul diselesaikan lewat demokrasi formal. Partisipasi warga negara dalam proses pembentukan demokrasi sejati akan menyingkap kontradiksi antara produksi yang disosialisasi secara administratif dan suatu bentuk yang tetap pribadi untuk memperoleh nilai-nilai yang dihasilkan. Supaya ketegangan jangan sampai menjadi jelas, sistem administrasi harus independen dari pembentukan kehendak yang melegitimasi. Masyarakat sendiri akhirnya harus menikmati status warga negara pasif.

d. Struktur Kelas

Menurut Habermas, struktur kelas kapitalisme lanjut tetap mengandung konflik. Konflik itu dibuat tetap terpendam atau bersifat *laten*. Krisis sistem diatasi dengan memusatkan semua kekuatan sosial integratif secara efektif. Struktur upah tergantung pada negosiasi antara pabrik-pabrik dan serikat-serikat buruh. Habermas melihat padanan antara penentuan harga

hasil industri dan harga tenaga kerja. Lewat negosiasi upah, mereka mencapai kompromi dengan lawan-lawan serikat mereka. Sehingga cabang-cabang industri monopolistik dan publik yang menentukan komoditi tenaga kerja serta perkembangan ekonomi memiliki harga "politis".

Beberapa perubahan yang menonjol akibat konflik yang tetap laten di atas, adalah berikut ini:

1. Perkembangan tingkat upah yang berbeda
2. Suatu inflasi permanen dengan redistribusi pendapatan yang merugikan pekerja upahan dan kelompok-kelompok marginal lainnya.
3. Krisis permanen keuangan pemerintah diiringi oleh proses pemiskinan, yaitu pemiskinan transportasi, pendidikan, perumahan dan kesehatan umum.
4. Keseimbangan perkembangan ekonomi yang tidak sepadan baik secara sektoral (misalnya pertanian) maupun regional (daerah-daerah marginal).

Negara kapitalis paling maju telah menyaring akibat samping krisis ekonomi dan menyebarkannya pada kuasi-politis seperti konsumen, anak sekolah, pasien rumah sakit, pemakai transportasi, orang jompo.

4. Tiga Masalah yang Muncul dari Masyarakat Kapitalisme Lanjut.

Menurut Habermas, proses perkembangan kapitalisme lanjut membawa problem-problem baru bagi sistem masyarakat dunia. Ia melihat adanya tendensi krisis dalam gangguan keseimbangan ekologis, keseimbangan kepribadian dalam bentuk alienasi, dan ketegangan eksplosif yang mewarnai hubungan-hubungan internasional.

a. Keseimbangan Ekologis

Habermas mengaitkan problem keseimbangan ekologis dengan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan energi, dan pertambahan penduduk. Penggunaan energi secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan teknologi memperluas produktivitas buruh. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Habermas tertarik pada proses pembentukan masyarakat kapitalisme lanjut yang diwarnai oleh kemajuan teknologi dan tingginya produktivitas buruh yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pada awalnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh akumulasi modal. Namun kini mekanisme pertumbuhan ekonomi menyebabkan pertambahan penduduk dan produksi secara besar-besaran. Kebutuhan-kebutuhan

ekonomi penduduk yang makin banyak dan eksploitasi hasil-hasil alam dihadapkan pada terbatasnya sumber-sumber daya maupun sistem ekologi yang mampu menyerap pollutan (bahan-bahan polusi). Habermas menunjukkan bahwa mekanisme pertumbuhan penduduk merupakan batas maximum dari potensi bumi untuk menyerap pollutan. Gangguan ekologi yang dipikirkan Habermas menyangkut juga naiknya suhu atmosfer karena pertumbuhan ekonomi menggunakan energi yang makin banyak mengubah energi alam menjadi panas. Ia menganalisa pertumbuhan penduduk dan produksi suatu hari akan menghadapi batas kemampuan biologis lingkungan. Pada kenyataannya perubahan pertumbuhan penduduk menyangkut juga perencanaan produksi yang berkaitan dengan penambahan nilai gunanya.

b. Keseimbangan Antropologis

Habermas melihat adanya batas bagi berkembangnya sistem kepribadian dalam masyarakat kapitalisme lanjut. Batas itu adalah proses sosialisasi. Sosialisasi dipergunakan untuk menciptakan motif-motif tindakan. Gangguan keseimbangan antropologis terjadi jika anggota masyarakat mengikuti norma dan keputusan dalam masyarakat tanpa motivasi. Sebenarnya perilaku kita diarahkan oleh norma-norma yang membutuhkan pembenaran dan sistem-sistem interpretasi yang menjamin identitas. Gangguan itu didukung oleh kemampuan adaptatif setiap organisasi yang tidak tergantung pada motivasi-motivasi khusus dari anggota-anggotanya.

Selama sosialisasi membawa alam batin ke dalam suatu organisasi tingkah laku komunikasi, tidak ada legitimasi bagi norma-norma tindakan yang perlu didukung oleh motivasi. Mengenai keputusan-keputusan yang isinya masih tidak tentu, rakyat akan mematuhi bila diyakinkan bahwa semua keputusan itu didasarkan atas norma-norma tindakan yang sah. Jika motif-motif untuk bertindak tidak lagi berdasarkan norma-norma yang membutuhkan pembenaran dan jika struktur-struktur personalitas tidak lagi harus terintegrasi dalam sistem interpretasi yang menjamin identitas, maka penerimaan yang tak bermotivasi atas putusan-putusan akan menjadi suatu hal rutin yang dianggap biasa. Kesediaan untuk mematuhi dapat diharapkan seperti yang diinginkan.

c. Keseimbangan Internasional

Gangguan keseimbangan internasional tampak dalam potensi untuk membinasakan yang merupakan hasil kemajuan kekuatan-kekuatan

produksi. Teknologi pada dirinya bersifat netral. Hanya kekuatan produksi yang dapat bersifat destruktif. Gangguan ini tidak terbatas pada sistem masyarakat yang segalanya dimiliterisasi. Pada sistem masyarakat Kapitalisme lanjut, kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah ini bersifat terbatas. Suatu perlucutan senjata aktual tidak mungkin karena adanya kekuatan di belakang masyarakat kelas kapitalis dan paska kapitalis. Malahan lomba senjata pada dasarnya tidak sesuai dengan struktur masyarakat kapitalisme tua karena kapasitas permintaan pemerintah untuk barang-barang konsumen yang tidak produktif diatur sesuai dengan penambahan nilai guna modal secara teknologis.

5. Dalil-Dalil Tendensi Krisis pada Kapitalisme Lanjut

Habermas menyatakan bahwa tiga problem di atas merupakan konsekuensi pertumbuhan kapitalis. Kemudian ia menyebut tendensi-tendensi krisis yang khas pada sistem, yaitu *krisis ekonomi, krisis rasionalitas, krisis legitimasi, dan krisis motivasi*.⁶ Keempat krisis digolongkan menjadi dua, krisis sistem dan krisis identitas. Yang disebut krisis sistem adalah krisis ekonomi (dari sistem ekonomi) dan krisis rasionalitas (dari sistem politik). Sedangkan yang disebut krisis identitas adalah krisis legitimasi (dari sistem politik) dan krisis motivasi (dari sistem sosial budaya). Tidak ada krisis identitas dari sistem ekonomi, dan tidak ada krisis sistem dari sistem sosial-budaya. Dalil krisis ekonomi, krisis legitimasi, krisis motivasi, dan analisa Habermas mengenai penjelasan itu terdapat dalam teks *What does a Crisis Mean Today?*

a. Dalil Krisis Ekonomi

Menurut Habermas, kaum marxis menyatakan bahwa struktur kapitalis yang utama tak dapat diubah dan menciptakan krisis-krisis ekonomi. Dalam kapitalisme lanjut, negara mendorong politik kapital dengan sarana-sarana lain. Tesis ini dijelaskan menurut dua versi: versi marxis ortodox dan versi para revisionis.

Versi pertama, teori negara ortodox mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan negara intervensionis mengikuti hukum-hukum ekonomi. Sistem ekonomi diatur lebih oleh kekuasaan daripada oleh tukar menukar. Dan tendensi krisis sebanyak mungkin ditentukan oleh hukum nilai, ketidaksimetrisan yang dipaksakan secara struktural dalam tukar-menukar kerja upahan dengan modal. Akhirnya, kegiatan negara tak dapat secara konstan mengimbangi tendensi menurunnya tingkat keuntungan. Negara

hanya mampu menengahi kecenderungan itu, yaitu menyelesaikannya dengan sarana politis. Krisis ekonomi, menurut penjelasan pertama ini, terjadi karena aparat negara bertindak sebagai organ yang mengikuti hukum nilai secara tak sadar.

Versi kedua, menurut versi revisionis Marxis aparat negara tidak secara alami mengikuti logika hukum nilai, tetapi secara sadar mendukung kepentingan-kepentingan kapitalis monopolis yang bersatu. Teori agen ini memandang negara sebagai suatu kapitalis tertinggi yang berkuasa menggunakan akumulasi modal sebagai substansi perencanaan politisnya.

Menurut Habermas, kedua versi teori krisis ekonomi itu tidak mencukupi. Satu versi meremehkan negara, yang lain menaksir negara terlalu tinggi. Terhadap yang pertama, Habermas ragu apakah pengorganisasian kemajuan ilmiah dan teknologi serta sistem tawar-menawar kolektif tidak mengubah cara produksi. Nyatanya, campur tangan negara dalam proses produksi mengubah penentu-penentu proses penggunaan kapital. Dengan kekuatan perencanaannya sistem administrasi dapat mencari legitimasi demokratis. Caranya dengan menonaktifkan siklus krisis dan mengurangi akibat buruk krisis secara sosial. Siklus itu sendiri tergantung pada ada tidaknya proses akumulasi modal dari program riset, pembangunan, dan pendidikan yang dibiayai oleh negara.

Keberatan Habermas terhadap teori revisionis adalah sebagai berikut. **Pertama**, kita tidak dapat secara empiris mendukung asumsi bahwa aparat negara dapat secara aktif merencanakan, membuat bagan dan melaksanakan strategi ekonomi. Teori kapitalisme negara sebagai monopolis tidak dapat mengakui adanya batas-batas perencanaan administratif dalam kapitalisme tua. **Kedua**, kita tidak dapat juga secara empiris mendukung asumsi lain bahwa negara bertindak aktif sebagai agen monopolis bersatu. Teori tentang negara sebagai monopolis menilai terlalu tinggi makna kontak personal dan pengaruh langsung. Studi tentang perekrutan, penyusunan, dan interaksi macam-macam elite kekuasaan gagal menjelaskan hubungan-hubungan fungsional antara sistem-sistem ekonomi dan administratif.

Menurut Habermas, negara kapitalisme tua tidak dapat dimengerti secara tepat sebagai organ eksekutif yang tidak sadar akan liku-liku ekonomi maupun sebagai agen kapitalis-kapitalis monopoli yang bersatu. Mengikuti Claus Offe, Habermas berpendapat masyarakat kapitalisme tua dihadapkan pada dua kesulitan yang disebabkan oleh keharusan negara untuk campur tangan mengisi kekosongan fungsi pasar. Kita dapat melihat negara sebagai suatu sistem yang menggunakan kekuasaan yang sah.

Hasilnya berupa pelaksanaan keputusan-keputusan administratif secara berdaulat. Untuk tujuan ini negara membutuhkan loyalitas massa yang sedapat mungkin umum.

Dua kesulitan yang dihadapi adalah *krisis out put* dalam bentuk krisis efisiensi (rasionalitas). Dalam krisis ini sistem administrasi gagal menjadi pengendali macam-macam bidang kehidupan sehingga terjadi disorganisasi dan *krisis input* dalam bentuk krisis legitimasi. Dalam krisis ini sistem legitimasi gagal memelihara tingkat loyalitas massa yang diperlukan.⁷

b. Dalil Krisis Legitimasi

Menurut Habermas, kekuasaan yang sah harus mampu membuat perencanaan administrasi. Fungsi kekuasaan aparat negara yang makin banyak dalam kapitalisme lanjut dan perluasan bidang sosial yang ditangani oleh pemerintah memperbesar kebutuhan akan legitimasi. Oleh karena itu, negara tidak cukup memandang diri sebagai kapitalis tertinggi yang berhadapan dengan macam-macam fraksi kapitalis individu. Negara harus juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum penduduk untuk memelihara loyalitas massa dan mencegah runtuhnya legitimasi.

Negara dapat menghindari problem-problem legitimasi dengan membuat sistem pemerintah yang bebas dari kehendak yang mengesahkan. Negara melakukannya dengan melepaskan simbol-simbol ekspresif fungsi-fungsi instrumental administrasi. Tetapi kesempatan untuk manipulasi itu terbatas karena sistem budaya tetap bersifat melawan kontrol administrasi. Maka penerimaan legitimasi bersifat *self-destructive*. Usaha mengejar kekurangan legitimasi dengan cara manipulasi memiliki keterbatasan sistematis, yaitu ketidaksesuaian struktural di antara bidang-bidang kegiatan pemerintahan dan tradisi kultural.

Perluasan kegiatan negara membutuhkan legitimasi secara tidak proporsional. Hal itu terjadi karena hal-hal yang tadinya *taken for granted* secara kultural dan telah menjadi ciri-ciri eksternal sistem-sistem politik, kini dimasukkan dalam bidang perencanaan administrasi.

Perencanaan administrasi memiliki efek-efek yang meresahkan dan menjadi umum secara tak disengaja. Efek-efek itu memperlemah kemampuan pembenaran tradisi. Tuntutan-tuntutan keabsahannya dapat distabilkan hanya melalui perbincangan (*diskursi*). Kemudian, perubahan hal-hal yang *taken for granted* secara kultural lebih lanjut mempolitisir bidang-bidang kehidupan yang sebelumnya dapat menjadi wewenang privat. Habermas melihat bahwa hal itu menunjukkan adanya bahaya bagi privatisme borjuis, yang secara informal dijamin oleh struktur masyarakat.

Tanda-tanda bahaya itu ada dalam usaha-usaha partisipasi dan dalam model-model alternatif, sebagaimana berkembang pada sekolah-sekolah dasar dan lanjutan, pers, gereja, teater, publikasi.

Dalil-dalil di atas, menurut Habermas, mendukung pendirian bahwa masyarakat kapitalisme lanjut tertimpa masalah-masalah legitimasi yang serius. Tetapi apakah argumen ini cukup untuk menjelaskan mengapa problem itu tak terpecahkan? Apakah argumen itu menjelaskan prediksi suatu krisis dalam legitimasi?

Kalaupun misalnya aparat negara berhasil membuat pekerja lebih produktif dan dapat mendistribusikan hasil-hasil produksi sedemikian sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi yang bebas dari krisis, pertumbuhan itu akan menyangkut prioritas yang lepas dari kepentingan umum penduduk. Model-model prioritas itu, mengikuti analisa Galbraith berasal dari suatu struktur kelas yang tetap bersifat laten, dan struktur ini akhirnya merupakan penyebab defisit legitimasi.

Negara tidak dapat begitu saja mengambil alih sistem budaya dan nyatanya ekspansi bidang-bidang perencanaan negara menciptakan masalah-masalah dalam hal-hal yang secara kultural *taken for granted*. "Makna" adalah sumber legitimasi yang makin langka. Kelangkaan makna menyebabkan harapan-harapan yang diatur oleh kebutuhan-kebutuhan konkret dan dapat teridentifikasi makin banyak di kalangan rakyat sipil. Tingkat kenaikan aspirasi seimbang dengan bertambahnya kebutuhan akan legitimasi. Legitimasi yang diberikan harus ditukar dengan ganjaran-ganjaran seperti uang, waktu, keamanan. Krisis legitimasi akan muncul kalau tuntutan-tuntutan ganjaran naik lebih cepat daripada besarnya nilai-nilai yang ada; atau jika harapan-harapan yang terjadi berbeda dan tidak dapat dipuaskan oleh ganjaran-ganjaran yang ada dalam sistem.

Selama program kemakmuran negara menjamin sejumlah privatisme sipil yang cukup, kebutuhan legitimasi tidak harus berubah menjadi krisis. Tentu saja, bentuk legitimasi yang demokratis menciptakan biaya-biaya yang tidak dapat ditutup jika bentuk itu membuat partai-partai yang bersaing saling mengalahkan dan dengan demikian menaikkan harapan-harapan rakyat. Tetapi mengapa masyarakat kapitalis lanjut bersusah payah memelihara demokrasi formal? Demokrasi formal dapat saja diciptakan oleh sistem administrasi dalam negara kesejahteraan yang otoriter atau negara otoriter facis? Namun keduanya sekarang tidak sesuai dengan kapitalisme maju jika dibandingkan dengan negara partai yang didasarkan atas demokrasi massa. Sistem sosio-budaya menciptakan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dipuaskan oleh sistem administrasi otoriter.⁸

c. Dalil Krisis Motivasi

Motivasi paling penting yang disumbangkan oleh sistem sosio-budaya dalam masyarakat-masyarakat kapitalis lanjut tercapai berkat sindrom (himpunan gejala-gejala) privatisme sipil dan privatisme keluarga atau kejuruan.⁹ Sindrom motivasional tersebut vital dalam sistem politik ekonomi. Bagaimanapun, ideologi-ideologi borjuis memiliki unsur-unsur yang secara langsung relevan dengan orientasi privatistik. Perubahan-perubahan sosial menghilangkan unsur-unsur dan basis borjuis.

(1) Ideologi Prestasi

Ideologi prestasi adalah gagasan borjuis bahwa ganjaran sosial seharusnya didistribusikan atas dasar prestasi individual. Syarat dasarnya ialah kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kompetisi yang diatur sedemikian sehingga pengaruh luar dapat dinetralkan. Mekanisme distribusi adalah pasar. Namun setelah pasar kehilangan kredibilitas sebagai mekanisme distribusi, sukses pasar digantikan oleh sukses profesional yang dimediasi oleh pendidikan sekolah formal. Ideologi prestasi hanya dapat memperoleh kredibilitas jika:

- a. Kesempatan memasuki sekolah lebih tinggi itu sama
- b. Tidak ada diskriminasi dalam standard evaluasi prestasi sekolah.
- c. Pembangunan sistem pendidikan dan okupasional berjalan sinkron.
- d. Struktur obyektif proses kerja mengijinkan evaluasi menurut prestasi-prestasi yang dapat dianggap berasal dari individu-individu.

Terhadap syarat ketiga dan keempat, ada arus masyarakat yang berlawanan:

- a. Perluasan sistem pendidikan menjadi makin terlepas dari perubahan-perubahan dalam sistem-sistem okupasional, sehingga akhirnya hubungan antara pendidikan sekolah formal dan sukses profesional kelihatan semakin longgar,
- b. Semakin banyak struktur produksi dan dinamika kerjanya mempersulit evaluasi prestasi individu. Bahkan, peran-peran okupasional semakin penting bagi pemberian status pekerjaan. Motivasi intrinsik bagi prestasi semakin lama semakin kurang mendapat dukungan dari struktur proses kerja dalam bidang-bidang kerja yang tergantung pada pasar. Sikap instrumentalis terhadap kerja meluas secara tradisional bahkan dalam profesi borjuis.

(2) Individualisme posesif (pemilikan)

Masyarakat borjuis melihat dirinya sebagai kelompok instrumental yang mengumpulkan kesejahteraan sosial hanya melalui kesejahteraan pribadi. Misalkan: mengusahakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum lewat kompetisi antar individu yang bertindak secara strategis. Tujuan-tujuan kolektif dapat dicapai hanya melalui tindakan-tindakan individu yang berorientasi pada asas manfaat. Sistem preferensi ini tentu mengandaikan: (1) bahwa subjek-subjek ekonomi pribadi dapat mengerti dan mengkalkulasi kebutuhan-kebutuhan tetap untuk periode-periode waktu yang ditentukan; (2) bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh barang-barang yang dapat diminta (*demandable*) secara individual (biasanya, dengan memakai keputusan-keputusan yang sesuai dengan sistem itu).

Masyarakat kapitalisme maju tidak lagi memperhatikan kedua pengandaian tersebut. Mereka telah mampu menghindari beberapa bahaya-bahaya kehidupan fundamental dan pemuasan kebutuhan-kebutuhan dasar. Itulah sebabnya sistem preferensi yang individualistis menjadi tidak jelas. Penafsiran dan reinterpretasi yang mantap atas kebutuhan-kebutuhan menjadi bahan pembentukan kehendak kolektif. Semua penafsiran itu membuka komunikasi yang bebas maupun kuasi-politis bagi supplier di antara para konsumen. Sosialisasi produksi meluas, kuota komoditi-komoditi kolektif di antara barang-barang konsumen tetap berkembang. Kondisi-kondisi hidup perkotaan semakin tergantung pada suatu infrastruktur, yaitu transport, waktu luang, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Habermas juga mengintroduksi beberapa situasi pasar yang memperlemah efek-efek sosialisasi, khususnya pertumbuhan penduduk yang tidak mempunyai *income* atau nilai tambah dari kerjanya. Misalkan: mahasiswa, para pensiunan, orang-orang jompo, tentara, penjahat, dan lain-lain. Juga perluasan bidang-bidang kegiatan yang lebih menekankan pekerjaan konkret, misalkan: pelayanan sipil, pengajaran. Apalagi waktu luang yang ada menyangkut motif-motif kekuasaan. Jam kerja yang berkurang tidak secara otomatis menjawab kebutuhan finansial lain yang belum tercukupi. Erosi tradisi borjuasi yang berorientasi pada nilai tukar-menukar menghasilkan struktur-struktur normatif yang tidak lagi cocok dengan perkembangan reproduksi privatisme sipil, kekeluargaan dan profesional. Ketidaksesuaian fungsional dari sistem-sistem ekonomi dan politik dihalangi oleh rintangan-rintangan budaya. Mereka hanya dapat dibongkar dengan ongkos kerugian motivasional yang luar biasa.

(3) Moralitas Universalistis

Moralitas universalistis berasal dari moralitas pribadi borjuis. Pada saat masyarakat-masyarakat modern memasuki proses modernisasi, muncul problem-problem pengendali yang memerlukan perubahan norma-norma sosial. Hal ini menyebabkan isi norma dilepaskan dari struktur tradisi dogmatisnya, tetapi tidak dilepaskan dari maksud dan tujuannya. Norma-norma hukum dipisahkan dari kesatuan norma moral yang diprivatisir. Apalagi Norma-norma hukum itu perlu dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip universal dan membutuhkan pembenaran dari masyarakat. Namun moralitas orang-orang privat kalangan borjuis menemukan hambatan berupa kondisi alamiah yang berlangsung di antara negara-negara. Karena moralitas pokok hanya dapat disangsikan oleh otoritas murni kesadaran, maka klaim universalitas berkonflik dengan moralitas masyarakat yang masih terikat pada subjek negara konkret. Maka terjadi konflik antara kosmopolitanisme dan kesetiaan para warga negara.

Untuk menyelesaikan konflik, dikotomi moralitas lahir dan batin harus dihilangkan. Perbedaan bidang legal dan moral direlativir. Sementara itu validitas segala norma terikat pada pembentukan kehendak rakyat secara diskursif. Dalam kapitalisme maju, tuntutan akan legitimasi makin tinggi. Tetapi seperti halnya ilmu pengetahuan tidak dapat begitu saja membuang tahap pengetahuan akumulatifnya, sistem moral tidak dapat membuat kita melepaskan tahap kesadaran moral yang telah dicapai secara kolektif lewat diskursi.

Penutup

Yang tetap dalam masyarakat kapitalis adalah kontradiksi dalam pembagian kekayaan umum. Bagaimana kekayaan umum itu dibagi secara tidak merata tetapi tetap sah, itulah problem kapitalisme lanjut. Habermas tidak mengklaim secara dogmatis bahwa pola perkembangan masyarakat kapitalis akan menuju penghancuran diri. Jawaban Habermas bersifat kondisional. Bukan jawaban ya atau tidak secara kaku.¹⁰

Krisis masyarakat "dapat" terjadi jika syarat-syarat tertentu terdapat dalam masyarakat itu. Kata "dapat" ini menunjukkan bahwa krisis itu bukan sesuatu yang tidak akan terjadi atau pasti terjadi. Tidak akan terjadi karena potensi dasarnya tetap ada, dan tidak pasti terjadi karena tergantung perkembangan masyarakat itu dengan kondisi yang ada di dalamnya. Berbeda dengan Marx yang meletakkan krisis masyarakat pada

bidang ekonomi, Habermas meletakkan krisis itu pada tempat yang lebih luas. Krisis yang menjadi pusat perhatiannya adalah krisis sosial budaya. Habermas tidak hanya memahami tindakan manusia yang esensial hanya terdapat pada kerja seperti Marx, tetapi juga pada komunikasi. Krisis di bidang sosial-budaya ini dapat mengakibatkan krisis legitimasi dalam masyarakat kapitalisme lanjut.

Ciri masyarakat kapitalisme lanjut adalah bahwa negara berintervensi dalam bidang produksi dan sosialisasi. Campur tangan negara pada bidang ekonomi dan sosial-budaya ini menunjukkan perluasan kegiatan negara dibandingkan dengan negara dalam kapitalisme liberal. Untuk menjalankan itu, sistem politik-administrasi membutuhkan dukungan masyarakat, membutuhkan legitimasi atau pengesahan dari masyarakat berupa loyalitas massa. Sebagai gantinya negara memberikan kesejahteraan sosial. Kalau negara tidak dapat menjalankan hal itu, sebagai hal yang perlu untuk mempertahankan eksistensinya, negara mengalami krisis rasionalitas. Dengan demikian negara juga dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan, kesulitan untuk memperoleh legitimasi.

Sumber legitimasi adalah sistem sosial budaya yang menyediakan "makna". Dalam masyarakat kapitalisme lanjut makna itu semakin langka. Tindakan masyarakat pada dasarnya harus didukung oleh motif-motif, sesuatu yang mempunyai makna. Kalau sistem sosial-budaya menyediakan lebih sedikit kemungkinan untuk memecahkan masalah demi keberlangsungan tatanan kapitalisme lanjut, maka terjadi krisis legitimasi. Jadi krisis legitimasi berakar pada krisis motivasi yang bersumber pada sistem sosial budaya dan juga krisis rasionalitas. Dari sistem sosial-budaya, krisis motivasi itu mungkin terjadi karena adanya erosi budaya pendukung sistem kemasyarakatan, yaitu ideologi-ideologi borjuis seperti dilihat Habermas dalam ideologi prestasi, individualisme posesif, moralitas universalistik.

Habermas mencatat bahwa jika tidak ada kesepakatan yang mencukupi antara struktur-struktur normatif yang saat ini masih memiliki kekuatan dan sistem politik ekonomi, maka kita tetap dapat menghindari krisis motivasi dengan melepaskan sistem budaya. Kebudayaan lalu akan menjadi obyek pengetahuan profesional. Pemecahan itu akan terhambat jika keyakinan-keyakinan dasar etika komunikasi dan kompleks pengalaman kounter-budaya memperoleh kekuatan pembentuk motif yang menentukan kekhasan proses-proses sosialisasi. Dugaan macam itu didukung oleh beberapa gejala tingkah laku yang makin meluas di antara kaum muda. Semua gejala itu merupakan bidang-bidang primer untuk mengecek

hipotesa-hipotesa kita bahwa masyarakat-masyarakat kapitalisme lanjut terancam oleh runtuhnya legitimasi.

Sebagaimana biasa, pemikiran Habermas tidak bersifat dogmatis, maka pemikirannya tetap terbuka pada diskursus rasional. Bagi bangsa yang banyak belajar dari negara-negara kapitalis atau kurang lebih menerapkan ide-ide kapitalisme, refleksi Habermas sangat berguna untuk menjadi perangkat memikirkan masa depan perkembangan masyarakatnya. Apalagi sekarang komunisme makin tidak mendapat tempat. Situasi semacam ini dapat membuat kita terlalu percaya pada sistem kapitalisme dan kurang merefleksi perkembangan masyarakat dengan keseluruhan nilai yang ada di dalamnya.

-ooOoo-

Daftar pustaka:

Habermas, Jurgen

- 1989 *What does a Crisis mean today? Legitimation Problem in Late Capitalism*, esai dalam Steven Seidman (ed.), *Jurgen Habermas on Society and Politics*, Boston, Beacon Press, hal.266-267
- 1975 *Legitimation Crises*, Boston, Beacon Press
- 1990 *Kemajuan Teknis dan Lingkungan Hidup Sosial*, esai dalam Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi, Jakarta, LP3ES
- 1989 *The Public Sphere*, esai dalam Steven Seidman (ed.), *Jurgen Habermas on Society and Politics*, Boston, Beacon Press, hal.231-236
- 1979 *Legitimation Problems in the Modern State*, esai dalam *Communication and the Evolution on Society*, London, Heinemann McCharthy, Th.
- 1978 *The Critical Theory of Jurgen Habermas*, Cambridge, The MIT Press, hal.358-386 Parsons,T.
- 1972 *Social System*, dalam David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of Social Sciences* 15, 16, 17, New York, The Macmillan and The Free Press, hal. 458-472

Catatan akhir:

- 1 Menurut Habermas, Marx memahami suatu krisis ekonomi dalam arti proses pertumbuhan ekonomi yang ditanggapi oleh suatu krisis. ... Bagi Marx berarti pertumbuhan ekonomi diatur oleh suatu mekanisme yang menetapkan sekaligus menyembunyikan suatu hubungan kekuasaan. Di sini model kompleksitas kontradiktif yang muncul dalam arti bahwa sistem ekonomi tetap menciptakan masalah-masalah baru dan lebih banyak. ... Marx lalu mencoba menjelaskan tipe klasik krisis dengan menggunakan teori nilai dengan bantuan hukum mengenai tingkat profit yang cenderung menurun. (*Jürgen Habermas on Society and Politics*, hal. 267)
- 2 Lihat Parsons, T. (1972) hal. 458
- 3 Dunia kehidupan adalah, "dunia dimana manusia-manusia dilahirkan, hidup dan akhirnya mati. Dunia dimana mereka mencintai dan membenci, mengalami kemenangan dan penghinan, ... dunia dari segala macam tekanan sosial dan dorongan individual, ... dan perasaan-perasaan serta persepsi-persepsi yang tidak dapat dibagi dengan orang lain" (*Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, hal. 107)
- 4 Bidang privat dibedakan dari bidang publik. Bidang publik menunjukkan bidang kegiatan teratur yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi oleh aparat yang mendapat monopoli atas penggunaan kekuatan secara sah, misalnya bidang militer ... Sedangkan bidang privat menunjuk pada kegiatan yang dikerjakan orang-orang tanpa monopoli kekuasaan tertentu, ... orang-orang yang tidak memegang kekuasaan publik, misalnya bidang pers. (*The Public Sphere*, hal. 231-234).
- 5 Habermas memberikan pengertian Legitimasi, "kepatutan suatu ordo politik yang sah untuk diakui. Problem legitimasi muncul jika ada pihak yang menolak dan ada pihak yang mengakui legitimasi. (*Legitimation Problems* ..., hal 178-179)
- 6 Lihat Habermas, J. (1975) hal. 43-44
- 7 Habermas memberi contoh: "Budget pemerintah ... dibebani dengan biaya-biaya publik untuk produksi yang dimasyarakatkan secara meluas. ... Semua ongkos ini harus diterima dari pajak ... Ia harus memungut pajak untuk mencegah suatu krisis pertumbuhan yang menganggu. Tambahan lagi, perisikkan pajak yang selektif, ... harus berfungsi sedemikian untuk memuaskan kebutuhan yang muncul demi legitimasi. Jika negara gagal pada tugas pertama, hasilnya adalah defisit dalam efisiensi administrasi. Jika gagal pada tugas kedua, hasilnya adalah defisit dalam legitimasi." (Habermas, J. (1989) hal. 275)
- 8 Refleksi itu membawa Habermas pada tesis: "Hanya suatu sistem sosio-budaya yang kaku, ... dapat menjelaskan bagaimana kesulitan-kesulitan legitimasi berakhir dalam suatu krisis legitimasi. Perkembangan ini karenanya harus didasarkan pada krisis motivasi, yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan bagi motif-motif yang ditawarkan oleh sistem negara dan diungkapkan oleh sistem kekuasaan dan persediaan motivasi yang ditawarkan oleh sistem sosio-budaya" (*ibid.* hal 278)
- 9 Habermas menjelaskan arti privatisasi: "Privatisasi sipil berarti minat-minat yang kuat terhadap output sistem administrasi dan partisipasi yang kecil dalam proses pembentukan kehendak. ... berkaitan dengan struktur sebuah masyarakat yang didemokratisir. Privatisasi keluarga dan kejuruan ... meliputi sebuah orientasi keluarga dengan minat komersial dan waktu luang, kenyamanan dan orientasi karir yang konsisten dalam kompetisi status ... berkaitan dengan struktur pendidikan dan sistem-sistem yang diatur oleh prestasi kompetitif.
- 10 Lihat Parsons, T. (1978) hal. 358-386.

TEKNOLOGISASI DI INDONESIA DAN UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA

(Sebuah Kontekstualisasi Pemikiran Kritis Habermas)

Pengantar Redaksi

Memasuki Pembangunan jangka Panjang Tahap Kedua ini kita sibuk mencari arah di masa depan dengan bertitik tolak dari roda pembangunan yang telah kita galirkan. Arah teknologi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta kebijakan alam semesta bagaikan dua saudara yang tidak bisa dipisahkan. Redaksi menawarkan serentai wawancara dengan F. Budi Hardiman, Frans Magnis-Suseno dan Suwardi Brata. Bagaimana pola modernisasi yang dibimbing teknologi ini dilakapi secara kritis di dunia asal teknologi terutama dari pemikiran Mazhab Frankfurt menjadi titik tolak wawancara itu. Setyo Wibowo dibantu Bambang Radianto melakukan refleksi itu dalam lembar sejarah pembangunan kita. Hasil wawancara ini dilengkapi dengan berbagai sumber, seperti buku, koran, teks asal Habermas dan makalah-makalah "Seminar Habermas" di STP Driyarkara dalam semester genap tahun ajaran 1991/1992.

Pendahuluan: Upaya menuju masyarakat "Cerdas"

Teori Kritis Habermas bermaksud membantu proses refleksi diri masyarakat atas pembentukan dirinya sendiri. Ia mau mengusahakan terjadinya suatu masyarakat "cerdas" yang sadar dengan formasi-dirinya menuju ke kedewasaan (*Mündigkeit*). Bentuk masyarakat itu mempunyai "rasionalitas" yang mengarah pada otonomi kedewasaannya. "Rasionalitas" ini mau dicapai lewat proses rasionalisasi sub-sistem tindakan rasional-bertujuan (*Zweckrationales Handeln*) dan rasionalisasi tindakan komunikatif (*Kommunikatives Handeln*).

Habermas tidak menolak perkembangan ilmu dan teknologi. Teknologi dipandanginya berhasil mengemansipasikan manusia dari kendala-kendala alamiah objektif. Ia mengakui bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dengan rasionalitas-kognitif menghasilkan kekuasaan politis serta kemakmuran ekonomi. Namun ia tidak setuju bila rasionalitas itu ditekankan secara berat sebelah dan mengabaikan rasionalitas tindakan komunikasi. Penekanan berat sebelah yang menyebabkan kemajuan rasionalitas tindakan bertujuan dengan teknologi sebagai sarannya ternyata menghasilkan patologi sosial. Ini terlihat dengan adanya alienasi manusia, desintegrasi sosial, individualisme, hilangnya nilai-nilai moral-kultural serta munculnya etika utilitarianisme yang menghasilkan konsumerisme dan hedonisme.

Habermas tidak menolak atau menegasi modernisme begitu saja. Ia bahkan menolak pemecahan tidak masuk akal dari generasi pertama teori kritis, Mazhab Frankfurt yang menolak mentah-mentah teknologi yang sekarang ada dan ingin menggantinya dengan suatu "teknologi baru" yang tidak repressif.¹ Modernisme yang ada sekarang ini harus lebih diseimbangkan. Perkembangan teknologi, secara imperatif kategoris seharusnya diimbangi oleh rasionalisasi di bidang praksis komunikatif. Jika itu tercapai, masyarakat "cerdas" yang kritis dengan pembentukan dirinya sendiri menuju ke otonomi yang mendewasa (*Mündigkeit*) akan terwujud.

1. Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Demokrasi Politik dalam Sejarah Indonesia

Masa Orde Baru sejak dini telah dicanangkan sebagai masa pembangunan, khususnya pembangunan dari segi fisik. Di Indonesia, pembangunan kerap diidentikkan dengan dimulainya proses industrialisasi dan teknologisasi. Kedua proses itu berjalan seiring dengan tujuan Orde Baru, yaitu menciptakan kemakmuran yang adil dan merata. Problem pemacuan ekonomi (dalam industrialisasi dan teknologisasi), pemacuan menuju manusia utuh (dalam demokratisasi) akan disoroti dalam kaitan dengan historitas kemunculan orde baru sebagai *the ruling class* di Indonesia sekarang ini.

Menurut analisis Liddle, Orde Baru bertujuan menciptakan **persatuan nasional dan pembangunan ekonomi**. Keduanya ditempuh dengan (a) pemadaman konflik-konflik secara efektif, dan (b) penciptaan ketertiban politik dari atas, bukan dari bawah. Pandangan Orde Baru ini banyak dilandasi kenangan pahit "demokrasi". Yang ada pada masa Orde Lama ('50-'65) hanyalah konflik-konflik antar suku ('50-'55), antar agama ('56-'61), serta kelas sosial ('61-'65).

Para pemegang tampuk pimpinan Orde Baru mempunyai pengalaman berperang melawan gerilyawan muslim ('50- an), menggempur pemberontak dari daerah (para perwira muda AD), berjuang hidup mati melawan PKI, dan pengalaman percekcoakan tanpa henti antara politisi-politisi di parlemen serta hilangnya komando pemerintah atas ekonomi.

Berdasarkan pengalaman ini Orde Baru akhirnya membuat siasat, yaitu mementingkan penciptaan persatuan di kalangan mereka, lalu mengontrol secara ketat kelompok "*yang lain*", teristimewa golongan muslim,

kalangan regional, dan komunis. Kontrol diarahkan untuk dua tujuan : persatuan nasional dan stabilitas ekonomi-pembangunan. Operasionalisasi siasat tersebut diwujudkan dengan mengandalkan Angkatan Darat sebagai basis dukungan politik utama (*koersif*), lalu mencari upaya-upaya legitimasi lewat bertindak secara konstitusional (*persuasif*) dan akhirnya memajukan pembangunan ekonomi (*material*). Melalui selubung jabatan birokratis dan lembaga-lembaga demokratis yang dipilih lewat pemilu terciptalah basis yang kuat dari kalangan Angkatan Darat.

Dalam buku *Membuka Cakrawala*, terbitan Gramedia dalam rangka Ulang Tahun KOMPAS ke-20 dilukiskan pada tahun 1966 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berat. GNP merosot, inflasi melonjak, hutang luar negeri tidak terbayar. Untuk mengatasi krisis, Presiden Suharto berkoalisi dengan ekonom profesional, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro menerapkan teori ekonomi neo-klasik dan ekonomi pembangunan. Dengan penekanan pembangunan ekonomi, pada masa Orde Baru sistem kepartaian diorganisir oleh pemerintah. Oleh karenanya, dalam bidang ekonomi Orde Baru menganut ekonomi liberal, dan dalam bidang politik tidak liberal.²

Lalu bagaimana interaksi antara pembangunan politik dan ekonomi harus terjadi? Banyak aspek perlu dilihat. Bung Hatta menanggapi keduanya demikian: ekonomi dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Tujuan keadilan dan kemakmuran bukanlah soal ekonomi atau soal hukum belaka. Persoalannya adalah konsepsi politik. Menurut Bung Hatta, demokrasi sosial menjadi titik pangkal demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Tujuan kemakmuran dan keadilan tidak mungkin hanya didekati dengan konsepsi ekonomi teknis dan dilepaskan dari politik. Tujuan itu dicapai sesuai kondisi masing-masing negara dan kesatuan kemajuan kedua aspek tersebut. Kalau orang bicara soal demokrasi politik yang *harus* menyertai demokrasi ekonomi, orang tidak bicara soal perubahan struktur (karena ini tujuan yang tidak real) melainkan lebih membahas soal pengefektifan pembagian kekuasaan kepada lembaga dan organisasi yang diakui oleh struktur yang ada sekarang ini.

Penyelenggaraan pembangunan di Indonesia didukung oleh kebijakan struktur politik yang lebih menekankan stabilitas. Stabilitas terlaksana lewat depolitisasi massa dan pembentukan struktur baru yang diatur dan ditentukan dari atas. Sistem politik ini mendapatkan legitimasi karena didukung ABRI, Golkar, cendekiawan, pers dan kaum menengah baru yang terdiri dari birokrat dan pengusaha. Legitimasi diberikan karena pertimbangan politik rasional maupun karena mereka mendapatkan

manfaat lebih dari sistem baru tersebut terutama lewat hasil pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pihak yang tidak mendapatkan akses dalam struktur baru ini adalah rakyat jelata di pedesaan serta pekerja informal di kota. Kebijakan stabilitas membuat kekuasaan menjadi konsentris, kurang terbagi dan kurang dapat terawasi secara efektif.

Memang benar stabilitas politik memberi kesempatan bagi iklim pembangunan ekonomi. Namun tak dapat diingkari bahwa ia membawa ongkos sosial yang mahal. Partisipasi masyarakat tidak intensif lagi, kekuatan politik massa dinetralkan dan dicairkan, lembaga kontrol menjadi lemah. Demokratisasi sesungguhnya merupakan padanan dari ekonomi pasar. Politik demokrasi akan mengontrol dan mengendalikan ekonomi pasar. Kalau kontrol politik lemah, siapa yang mengendalikan ekonomi pasar itu? Dalam konteks ini soal kebebasan bersuara dan berpendapat amat dituntut realisasinya. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan politik dan pers memang ada, tetapi terbatas. Batasannya adalah tidak mengganggu kestabilan, tidak mengganggu *status quo* dan tidak menyentuh kepentingan-kepentingan *status quo*.

Dalam pidato Ulahat Golkar ke-25, Suharto sebagai Ketua Dewan Pembina organisasi politik terbesar menyatakan:

"Pembangunan politik selayaknya diberi perhatian yang besar. Pengalaman dari semua negara berkembang membuktikan bahwa pembangunan politik yang diabaikan dapat merupakan sumber bagi kelambatan dan kemunduran, juga sumber bagi munculnya berbagai kesulitan dan permasalahan yang mengganggu kemajuan dan pembangunan, dan bahkan dapat menggagalkan seluruh pembangunan menuju tingkat terdas. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan satu-satunya asas tidak membatasi ruang gerak kemerdekaan berpolitik, berkeompok, dan mengemukakan pendapat, sepanjang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum dalam melaksanakan UUD '45.

Pola keserentakan pembangunan politik dan ekonomi menjadi strategi bertindak. Indonesia tidak mendahulukan pembangunan politik atau mendahulukan ekonomi. Pola ini mempunyai argumen teoretis, empiris dan historis yang amat kuat. Masalahnya, dalam praktik pola ini amat rumit baik bagi pihak pemerintah maupun rakyat.³ Bagaimana keduanya itu bisa bergerak ke sasaran yang sama? Padahal di balik konsepsi pembangunan ekonomi atau politik itu pun, ada kepentingan-kepentingan tertentu di baliknya. Proses pembangunan ekonomi dan politik serta tarik menarik antar keduanya selalu diwarnai perbenturan antar kepentingan. Soal yang lebih penting bukan pada soal pemilihan pola yang kita buat, tetapi lebih bagaimana isi dari pola ini, arah dan kontrol terhadapnya? Fenomena bobot pelarangan-pelarangan yang masih tinggi daripada bobot kebebasan dan pemikiran kreatif serta ketidakefektifan kontrol dari pemerintah terhadap peranan swasta menunjukkan masih kuatnya tendensi inkonsistensi antara pola tindakan dan pelaksanaannya.

Bila kita melihat ruang pemanfaatan teknologi, tampak bahwa ada sebab-sebab objektif mengapa industrialisasi dan teknologisasi di dalamnya menjadi arus dasar situasi di Indonesia sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi yang begitu ditekankan dan dijalankan lewat teknokratisme dan disertai pendekatan keamanan merupakan ruang nyata yang mengitari soal teknologi ini. Rupanya kebijakan pemerintah dan peran modal dibaliknya menjadi penentu terjadinya arus tersebut. Sementara rakyat belum mempunyai akses dalam proses itu.

2. Asumsi-asumsi di Balik Teknologi

Permasalahan pemacuan ekonomi dan demokratisasi menjadi topik yang menonjol dari permasalahan di atas. Suwandi Brata ketika kami ditemui menyatakan, analisa proses pembangunan ekonomi dengan industrialisasi dan teknologisasi kita tidak dapat ditempatkan dalam ruang kosong. Tulisan hasil wawancara ini tidak akan menyoroti lebih jauh soal-soal strategi maupun konstelasi politis yang ada dibalik itu semua. Satu segi yang mau dibahas dan dikembangkan, seperti dianalisa Habermas, adalah soal kaitan teknologi dan usaha demokratisasi -pencerdasan masyarakat.

Franky, panggilan akrab Sdr. Budi Hardiman mensinyalir bahwa para konseptor pembangunan di Indonesia yang sebagian besar belajar di Amerika Serikat menganut teori-teori modernisasi, misalnya teori sistem (Parsons). Masyarakat modern adalah masyarakat yang rasional. Rasional berarti mampu memilah-milah antara konsep tradisional dan modern, antara fungsi yang satu dengan yang lain. Masyarakat dianggap berkembang secara linier dan tidak bisa mundur. Dibalik ini semua, konsep linier teori modernisasi Parsons sesungguhnya mengandung asumsi stabilisasi sistem-sistem, karena sistem-sistem itu ternyata bisa direkayasa demi suatu pertumbuhan.

Sebaliknya Habermas menunjukkan bahwa rasionalisasi tidaklah selinier yang dibayangkan. Tiap fakta yang ada sekarang ini selalu berkait dengan historisitasnya. Tidak ada sesuatu yang ada secara begitu saja. Aspek teknologi yang ada sekarang tidak terlepas dari historisitas teknologi itu sendiri. Justru berbahaya kalau teknologi dipandang berdiri sendiri, lepas dari asal-usulnya. Teori sistem tidak memadai untuk paradigma modernisasi, menurut Habermas, karena tidak peka terhadap patologi modernitas.

Menurut Franky, sistem teknologi⁴ sebagai hasil rasionalisasi sistem merupakan hasil persetujuan dengan dunia kehidupan (*lebenswelt*). Teknologi di sini mencakup instrumen, sistem kerja, sistem informasi, dan iklim teknis. Rasionalitas instrumental- sistem-fungsi-administratif tidak berjalan sendiri. Ia bisa muncul karena adanya persetujuan dari dunia sekitarnya, karena adanya apresiasi masyarakat sehari-hari yang menyetujuinya. Inilah modernisme yang sebenarnya menurut Habermas. Seandainya teknologi kita adopsi adalah hasil rasionalisasi masyarakat Barat. Awalnya teknologi muncul karena diakui dan diterima masyarakatnya. Teknologi yang menyebabkan keresahan masyarakat tentu saja akan ditolak seketika itu juga. Justru karena apresiasi terus-menerus dari masyarakat, teknologi terus maju. Dalam konteks seperti inilah seharusnya teknologi dilihat. Ia bukanlah sebuah barang bebas nilai atau netral.⁵

Bila teknologi - yang *de facto* berasal dari Barat - begitu saja diadopsi, apa akibatnya? Teknologi memuat imperatif-imperatif objektif. Penerapan atau pengambilalihan teknologi tanpa menyadari karakteristik tersebut dan lebih-lebih tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat setempat akan membuat diri kita tidak kritis terhadap teknologi. Sekaligus kita selalu merasa tergantung padanya. Dalam artian di atas tampak di satu sisi teknologi bukanlah barang yang netral, yang bisa begitu saja diambil. Hal terakhir ini harus disadari kalau menghadapi klaim netralitas teknologi. Mengapa teknologi dikatakan netral? Siapa yang mengatakan dan dapat dipertanyakan apakah ada asumsi atau kepentingan di balik pernyataan itu?

Teknologi di Barat pun, menurut pengamatan Franky terlalu menekankan rasionalisasi tindakan rasional-bertujuan sehingga menimbulkan macam-macam patologi sosial. Teknologi sekarang menjadi "masalah".⁶ Teknologi yang berkembang pesat kini mulai mendikte dunia kehidupan moral masyarakat. Teknologi yang berlogikakan *kalau mungkin ... berarti bisa* akhirnya menerjang dunia moral dengan logika lebih lanjut *kalau bisa ... berarti boleh*. Dunia kehidupan dan moralitas masyarakat seolah-olah sekarang hanya mengadaptasi saja perkembangan teknologi yang demikian pesat.

Teknologi yang berjalan seiring dengan berpengaruhnya ilmu positif mengandung unsur penguasaan. Subjektivitas yang muncul dari kesadaran budi adalah subjektivitas dalam bentuk "aku mengetahui (subjek) berhubungan dengan hal yang kuketahui (objek)". Subjektivitas yang termuat dalam teknologi berisi kepentingan penguasaan subjek-objek di

dalamnya. Justru karena sifatnya inilah, teknologi amat berkembang pesat meninggalkan dunia kehidupan yang sesungguhnya didasarkan pada relasi subjek-subjek dalam masyarakat. Kini masyarakat tinggal mengadaptasikan diri dengan segala kemajuan penguasaan teknologis itu. Moralitas, kebudayaan lokal, hubungan sosial antar subjek yang dulu berfungsi kritis kini kehilangan kekritisannya.

Dimensi kritis yang hilang itu menimbulkan krisis. Muncul krisis-krisis moralitas, krisis makna, krisis kebudayaan, disintegrasi sosial, muncul utilitarianisme dan individualisme, konsumerisme dan hedonisme, eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan alienasi di pihak manusia dan penghancuran lingkungan di pihak sumber-sumber alam. Inilah patologi sosial hasil teknologi yang mendikte dunia etis-moral hidup harian masyarakat. Hal terakhir ini kiranya masih perlu mendapat perhatian lebih serius lagi dalam pengadopsian teknologi di Indonesia. Adopsi teknologi tanpa mengetahui dan menyadari historisitas dan ekksesnya terhadap kondisi setempat mengarus dalam mental masyarakat sekarang ini dan dalam krisis-krisis di atas.

3. Masalah Teknologisasi di Indonesia

Franky menggarisbawahi bahwa dinamika tarik-menarik antara pemacuan ekonomi dan pemacuan manusia Indonesia seutuhnya perlu dikritisi. Masalah pertama adalah, dengan pengoperalian teknologi ke suatu masyarakat otomatis akan merubah pola dunia keseharian. Dapat dipertanyakan secara lebih terbuka, bukankah adopsi teknologi modern juga membawa dampak pada mentalitas masyarakat yang ikut menjadi modern pula? Masalahnya menjadi lebih problematis.⁷ Masalah kedua, benarkah bangsa kita harus merekayasa dan mempunyai suatu mentalitas industri, guna mempercepat proses lepas landas di atas alas industrialisasi?⁸

Porsi penempatan teknologi sebagai sesuatu yang netral begitu dominan menguasai pola pikir kita. Penerapan teori sistem Parsons dengan konsep kemajuannya berkepentingan terhadap stabilitas. Konsepnya cocok dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagaimana terjadi sekarang ini. Bila dimensi komunikasi yang ditawarkan Habermas disingkirkan dan ekkses-ekses patologis modernisasi dan teknologisasi sengaja ditutupi, apakah arah pertumbuhan ekonomi akan berjalan seimbang? Konsep modernisasi idealnya harus mencakup keduanya secara seimbang, baik pengembangan dimensi teknis maupun kemajuan di bidang

komunikatif. Teori sistem masih perlu dilengkapi dengan paradigma dunia-kehidupan. Sekurangnya itulah yang dilihat Habermas.

Suwandi Brata menyoroiti masalah di atas dari sisi lain. Secara konkret, masalah teknologisasi di Indonesia antara lain: pertama adalah soal *dumping limbah industri*. Sebagian besar teknologi yang dialihkan ke negara berkembang ternyata adalah *teknologi kedaluwarsa* yang polutif. Di negara asalnya sendiri teknologi itu sudah ditinggalkan; kedua adalah soal alih teknologi di Indonesia yang terjadi sebenarnya hanyalah impor teknologi. Adanya transfer teknologi itu justru memperjelas dependensi negara kita dan negara berkembang pada umumnya. Adanya anggapan bahwa untuk menguasai teknologi kita tidak usah menguasai *sains dasarnya*⁹ semakin melemahkan sikap kritis kita terhadap teknologi. Padahal justru penguasaan ini yang akhirnya akan membuat seseorang bisa membuat terobosan baru dalam teknologi. Tanpa menguasai sains dasar kita akan terdikte terus.

4. Menuju *Mündigkeit*

a. Peran Masyarakat

Franky melihat Habermas sebagai seorang modernis. Ia tidak menolak teknologi. Ia justru mengatasi jalan buntu yang dialami oleh generasi pertama teori kritis yang pesimis dengan perkembangan teknologi sebagai sarana perealisasi rasio instrumental yang mendominasi manusia menuju manusia berdimensi satu. Habermas memandang teknologi secara positif sebagai salah satu daya yang mengemansipasikan manusia terhadap alamnya.

Ketika teknologi menghasilkan patologi sosial karena teknologi kemudian mendikte aspek etis manusia, Habermas secara imperatif kategoris memandang perlunya rasionalisasi bidang etis-komunikatif manusia di samping rasionalisasi tindakan kerja. Salah satunya adalah demokrasi. Demokrasi dalam pengertian Habermas bukan sekedar demokrasi formal. Bahwa dalam suatu pemerintahan ada mekanisme pemilu beberapa waktu sekali dan ada partai, parlemen, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya belum menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut demokratis. Yang pokok dalam demokrasi adalah adanya ruang bebas, adanya diskusi rasional bebas masyarakat untuk berapresiasi tanpa takut upaya intimidasi dan penindasan.

Franz Magnis menambahkan, konkretnya mekanisme yang demokratis adalah suatu mekanisme dimana kekuasaan dan kebijakan-kebijakan dari

penguasa amat terbuka untuk dikritik. Mekanisme itu menjamin kesempatan kaum oposisi minoritas dengan bebas melakukan *demitologisasi* terhadap klaim-klaim yang diajukan oleh pihak penguasa. Mekanisme itu menjadi kekuatan masyarakat untuk menciptakan tekanan psikologis terhadap praktek penggunaan kekuasaan. Pemerintah diharapkan merealisasikan slogan-slogan yang diucapkannya sendiri. Dengan demikian, mekanisme itu memungkinkan orang dan terlebih-lebih pers dapat mempertanyakan secara terbuka apakah kebijakan pemerintah sungguh-sungguh demi **kepentingan umum** atau **kepentingan oknum**. Pengambil keputusan akhirnya akan merasa *tertekan* untuk membuktikan bahwa itu memang demi kesejahteraan umum dalam arti sebenar-benarnya.

Sehubungan dengan teknologi, demokrasi masyarakat diharapkan lebih mengapresiasi dan mengendalikan teknologi dengan kritik etisnya. Masyarakat mampu mengendalikan keputusan-keputusan penting dari pembuat kebijakan mengenai macam-macam keputusan tentang hidup, tentang senjata, tentang ekonomi, tentang lingkungan, dan kebijakan lainnya. Diharapkan semua kebijakan itu jelas dan pasti berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan teknologi seiring dengan dimensi etisnya. Yang dimaksud dimensi etis disini bukan dalam arti sempit, misalkan dalam konteks agama saja tetapi terlebih-lebih hak asasi manusia. Manusia akhirnya yang mengontrol dan mengendalikan teknologi dan bukan sebaliknya.

b. Peran Negara

Franky menyoroti lebih lanjut bahwa Habermas pun melihat adanya problem netralitas negara. Benarkah negara dalam konteks masyarakat kapitalisme lanjut yang bertujuan akumulasi modal adalah subjek yang netral dan mengatasi semua golongan? Habermas justru melihat bahwa negara-negara kapitalis lanjut tidak netral. Negara dalam praktiknya banyak berintervensi, menentukan perubahan-perubahan sosial, budaya teknologi, dan terutama kehidupan ekonomi masyarakat. Perannya yang amat besar identik dengan pola peran lingkaran raja dan bangsawannya di istana terhadap rakyatnya. Habermas melihat adanya tendensi *refeodalisasi*. Tendensi ini dilatar-belakangi kepentingan tertentu.

Intervensi yang dilakukan oleh negara kapitalis lanjut berfungsi untuk mengurangi eksekris ekonomi yang muncul dalam masyarakat sehingga aktivitas akumulasi modal tidak terganggu dan berlangsung terus. Di sinilah netralitas negara dipertanyakan. Dalam praktik, negara membela dan memihak pihak-pihak yang mampu menjalankan proses akumulasi

modal. Mereka yang mempunyai akses besar dalam bidang ini mendapatkan banyak kemudahan. Kegiatan ini dilakukan terutama lewat dan dengan teknologi. Anehnya, justru dengan aktivitas semacam ini negara makin mendapatkan legitimasi untuk berkuasa dari rakyat. Makin negara sukses melakukan akumulasi modal lewat teknologi, loyalitas rakyat membesar. Tapi Habermas mempertanyakan sampai kapan legitimasi masyarakat semacam itu tetap bertahan, padahal legitimasi itu esensial bagi sahnya suatu negara?

Teknologi yang digunakan masyarakat kapitalis lanjut telah menghasilkan macam-macam krisis yang mempengaruhi perubahan motivasi dan loyalitas masyarakat terhadap negara. Akhirnya krisis legitimasi kemungkinan besar akan mengakhiri eksistensi negara. Sejauh mana dampak modernisasi yang menekankan akumulasi modal mulai diantisipasi di Indonesia?

Penutup

a. Modernisasi dan teknologisasi

Pertanyaan di atas tidak mudah dijawab. Modernisasi dan perubahan melekat dalam proses pembangunan. Perubahan akan terus dan harus terjadi. Dalam hal ini teknik memainkan peranan yang amat penting. Yang harus jelas adalah sejauh mana modernisasi dan teknologisasi itu memang berjalan di bawah kacamata dimensi etis manusia universal dan bukan dipakai untuk kepentingan ideologis. Teknologi adalah netral sejauh sebagai sarana yang tak terelakkan untuk menuju perubahan. Namun sebagai kerangka acuan bagi militerisme, perekonomian dan aspek-aspek lainnya, teknologi tidak lagi bersifat netral. Teknologi telah memilih kepentingan tertentu. Maka sikap kritis terhadap teknologi amat dituntut. Tidak bisa begitu saja mengafirmasi setiap aplikasi teknologi dalam hidup sehari-hari.

Berkaitan dengan dominasi teknologi dalam kehidupan perekonomian, posisi negara-negara Selatan, yaitu negara-negara berkembang menjadi sulit. Modernisasi dan kemajuan kesejahteraan yang diupayakan mau tidak mau memakai sarana-sarana teknik.¹⁰ Padahal teknologi di Barat selalu maju. Maka, meskipun aplikasi teknologi di negara berkembang makin canggih, posisinya tetap tertinggal dibandingkan Barat. Akankah kita menjadi negara konsumen teknologi yang kekal, menjadi objek dan korban teknologi? Sementara kita tidak bisa mengejar teknologi di Barat,

kita dihadapkan dengan berbagai masalah sehubungan aplikasi teknologi itu sendiri, soal pendidikan, soal kebudayaan, soal demokrasi.

Secara faktual teknologi bergerak dalam dimensi *apa yang mungkin berarti bisa*. Ternyata dinamika pencarian dan perkembangan teknologi sebagai dimensi faktual ini, secara psikologis juga merupakan wujud realisasi diri manusia. Teknologi menjadi tempat manusia mengobjektifkan dirinya, merealisasikan dirinya sebagai manusia.¹¹

b. Demokratisasi

Badan fisik demokrasi, yaitu lembaga-lembaga dan mekanisme demokratis sudah ada. Yang perlu dilakukan adalah mengisi badan fisik itu dengan isi-isi yang sungguh-sungguh demokratis. Kelompok pelopor disini adalah kaum cendekiawan. Dan demokratisasi ini hendaknya dicapai dengan pertimbangan evolusi, bukan revolusi. Proses evolusi dilakukan terutama lewat *trialog* terus menerus antara militer-intelektual-calon politisi partai dan kaum ekonom swasta dan masyarakat sipil. Proses itu akan terealisasi bila seluruh masyarakat memiliki ruang yang besar untuk menentukan nasibnya sendiri.

Liddle menganalisa, arus demokratisasi di negara dunia ketiga muncul karena (a) krisis legitimasi dari pihak atas yaitu kebijakan pokok pemerintah otoriter yang gagal memenuhi kesejahteraan rakyat, (b) dorongan dari bawah yang mendesak untuk diberi hak partisipasi politik yang makin besar. Pemerintah Indonesia sekarang ini memiliki legitimasi yang tinggi, sementara gerakan dari bawah amat lemah. Dalam situasi itu, Liddle melihat evolusi demokratisasi berjalan secara pelan-pelan. Mencari "cetak biru demokratisasi" amatlah muskil. Terlalu banyak variabel yang ikut menentukan jalannya proses demokrasi. Semua itu amat tergantung dari faktor kemauan para pemegang kekuasaan yang sesungguhnya sulit untuk diramalkan.

Fakta sejarah rakyat Korsel membuktikan bahwa demokrasi tidak merusakkan pertumbuhan ekonomi. Perubahan sistem otoriter represif yang mula-mula dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan berubah ke demokrasi berkat kesadaran politis yang meluas. Para cendekiawan, mahasiswa, buruh dan pers berani menuntut demokrasi kepada pemerintah. Akhirnya sistem demokrasi di Korsel dengan ciri-ciri pokok pemilihan bebas, hak-kewajiban dan kesempatan yang sama bagi semua partai politik, suksesi pemerintahan dengan mekanisme pemilu serta kebebasan pers yang cukup besar, dapat dijalankan secara dewasa dan bertanggungjawab.

Daftar Pustaka:

- Habermas, Jürgen. *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Hardiman, Badi F. *Quo Vadis Proyek Modernisasi, Habermas dan Rasionalitas Masyarakat*, Driyarkara No 3.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Industri, Sains, dan Teknologi*, KOMPAS, Rabu 1 Juli 1992.
- Kompas. *Menuju Masyarakat Baru Indonesia: Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XX*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Liddle, W. *Pemilu-Pemilu Orde Baru : Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Proksy, Sompie. *Marcuse, Dominasi Teknologi dalam Masyarakat Modern*, Driyarkara Thn. XVIII, No.3.
- Sudarminta. *Dimensi Etis dalam Penilaian Kebijakan Teknologi Memasuki Masyarakat Industrial Swantoro* (red). Membuka Cakrawala: 25 Tahun Indonesia dan Dunia dalam Tajuk Kompas, Jakarta: Gramedia, 1990.

-00000-

Catatan Akhir:

1. Habermas mengutip analisis Marcuse, "... teknik itu sendiri sudah merupakan kekuasaan (atas alam dan atas manusia), kekuasaan yang metodis, ilmiah, yang sudah diperhitungkan dan yang menghitungkan hitung. Tujuan dan kepentingan tertentu dari kekuasaan ... sudah masuk ke dalam pembuatan alat-alat teknik itu sendiri. ... Dalam pandangan Marcuse, penindasan yang secara objektif berlebihan itu terlokasi dalam internalisasi penindasan individu di bawah aparat produksi dan industri yang dahsyat, waktu sanggup yang tidak bernilai pribadi lagi ..." (*Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, Jürgen Habermas, LP3ES, 1990, hal. 48-49)
2. Bdk. Bab 7 Masa Lalu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia dalam *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, hal. 100-141.
3. Sebagai ideologi dan konsep, Indonesia memiliki paham komunisme yang kuat. ... Bahkan konsep pembangunan Indonesia juga ditarik dari ideologi dan konsep itu menjadi konsep pembangunan manusia seutuhnya. Baik oleh kondisi objektif maupun oleh perepsi kultural yang belum sepenuhnya berkorepondensi dengan ideologi dan konsep komunisme itu, kita masih harus meneliti jauh yang cukup jauh sebelum ideologi dan konsep itu terwujud. (*Menuju Masyarakat Baru Indonesia*, KOMPAS-GRAMEDIA, hal. _)
4. Teknologi, secara etimologi berasal dari kata *techne* dan *logia* yang berarti kemapuan manusia untuk menerapkan ilmu pengetahuannya tentang alam dan tentang dirinya sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang positif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini.
5. Dianggap teknologi berperan sebagai sarana instrumental. Sarana demi efektivitas kerja memang bernilai intrinsik. Dalam arti ini teknologi bisa diterapkan dimana saja karena berfungsi mempermudah kerja manusia. Namun teknologi juga merupakan sesuatu yang sarat nilai. Sebagai buah ciptaan manusia, teknologi tidak dapat dipisahkan dari pola budaya, nilai dan kepentingan manusia pencipta maupun pemakainya. ... Nilai

sosial-budaya dalam masa marjinal mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh masyarakat suatu teknologi baru. Pada akhirnya, teknologi baru selalu membawa perubahan sosial. (Dimitri Ekt dalam *Perubahan Kebijakan Teknologi Memasuki Masyarakat Industriai*, oleh I. Sudarmanta)

- 6 Masalah dalam konteks ini bisa dijelaskan dengan adanya berbagai efek sampingan dari teknologi, akibat dari sifatnya yang eksploitatif dan tidak memperhatikan dunia sekitarnya. Teknologi memang memberikan industri baja, kapal laut, dan mobil untuk memperkaya pendahulu manusia. ... Teknologi menyediakan keamanan dan kenyamanan kepada manusia (AC, bensin, es, penyempit perut) tetapi sekaligus menghasilkan klorofluorokarbon dan tetrafluoro-ethylene polymer yang ikut menciptakan lapisan ozone di atmosfer. Teknologi memungkinkan manusia memanfaatkan sumber daya hutan secara lebih maksimal, tetapi berapa banyak jenis ciptaan Tuhan yang bernilai amat vital bagi ekosistem dan kelangsungan hidup manusia sendiri juga ikut rusak? (*Menjadi Masyarakat Baru Indonesia*, hal. 34-35)
- 7 Prinsip menaruhbukan, problem itu erat kaitannya dengan sifat teknologi yang tidak netral dan mengandung nilai-nilai tertentu. Pengetahuan teknologi dari negara industri maju ke negara berkembang berarti juga pengalihan nilai-nilai yang secara implisit terkandung dalam teknologi yang diambil alih tersebut. Maka bila pengalihan itu tidak dilakukan secara kritis.
- 8 Kesenjangan yang berpedapat: bisa kita mau melapadkan ekonomi berdasarkan industrialisasi dalam 15 tahun mendatang, maka proses rasialis budaya agraria-pedesaan serta budaya birokrasi-perkotaan ke kebudayaan nasional harus dilakukan industri harus dipercepat. ... terutama memperlakukan manusia-manusia yang beriman dan juga harus dilakukan industri. Maka sudah, manusia yang berpandangan positif terhadap makna hidup dan berakap gigih mencapai tujuan serta berani mengambil jalan alternatif? ... tidak hanya bekerja demi mendapat makan, hadiah, kedudukan, ... berorientasi ke masa depan dan berakap benar. ... berakap ekspansif dan ingin menyeleni ribasi-ribasi alam, dan menilai tinggi komandirasi, berani bertanggungjawab. ... Kesenjangan yang komedian merupakan agar hal ini dijadikan gerakan baik lewat kampanye-kampanye maupun insentif yang tepat melalui media massa dan bahkan melalui kelompok agama dan lewat contoh para pemimpin bangsa. (Kompas, 1 Juli 1992, hal. 4, *Kebudayaan Industri, Sains, dan Teknologi*)
- 9 Suwandi Bawa mengatakan bahwa Penggunaan sains dalam memang memecahkan situasi dan yang amat besar. Tetapi bila bidang ini tidak dimasuki, kita akan tetap dalam status tertinggal teknologi tanpa mau mencoba mencobanya.
- 10 Franz Magnis-Suseno melihat bahwa perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat dan penerapannya dalam kegiatan ekonomi membuat Indonesia sudah-sudah terancam dan merasa tidak mempunyai pilihan lain selain harus ikut mengarus. ... Kemajuan bangsa Indonesia telah terdite oleh bangsa-bangsa lain yang menguasai ilmu dan teknologi yang akhirnya akan menguasai ekonomi juga. (*Menjadi Masyarakat Baru Indonesia*, Kompas-Grasmedia, hal. 74)
- 11 Tidak saja manusia sebagai homo faber untuk pertama kalinya dapat mengobjektifkan dirinya dengan ampunan dan menghadapi kemampuan-kemampuan yang telah dimandirikan di dalam produk-produknya sendiri. Namun sebagai homo faberitas ia sendiri juga dapat diintegrasikan ke dalam instalasi-instalasi tekniknya sendiri. (*Ilmu dan Teknologi sebagai Biologi*, hal. 82)

—atau—



INDEKS TEMATIS

Malai edisi ini kami akan memuat indeks pengarang, judul artikel dan edisi yang memuatnya berdasarkan tema yang pernah kami muat. Penggolongan tema dilakukan sedekat mungkin dengan yang tercermin dari artikel yang bersangkutan. Berturut-turut akan dimuat mulai dari tema **ETIKA POLITIK, HUMANISME, EPISTEMOLOGI-FILSAFAT BARAT, FILSAFAT TIMUR, FILSAFAT AGAMA, FILSAFAT PENDIDIKAN, SOSIOLOGI PEMBANGUNAN, SENI-BUDAYA**. Buku-buku tersebut dapat Anda dapatkan di Redaksi.

1. ETIKA POLITIK

Andang, AJ	<i>Negara dalam Preskripsi Mahamad Iqbal</i>	Th. XV, No. 1, 1985
Cahyadi, Hari	<i>Suatu Telaah Negara dan Ideologi menurut Louis Althusser</i>	Th. XV, No. 1, 1985
Hardiman, Budi P	<i>Berpapir dengan Pancasila-pancasi Modern</i>	Th. XIII, No. 2, 1983
Hariyanto, J. N	<i>Analisa Organisasi Politik ----- Masa</i>	Th. VI, No. 3, 1976
Iman, Haryono R	<i>Aliran Kultural dalam Pemikiran Karl Marx menurut Louis Dugre</i>	Th. XIII, No. 2, 1983
Korol, Sony A	<i>Membedah Legitimasi Teknokrasi dalam Sistem Demokrasi</i>	Th. XII, No. 1, 1980
Laser, Alex	<i>Pancasila sebagai Ideologi Negara</i>	Th. XVIII, No. 1 1991/2
Moring, Elias	<i>Teori Politik Rousseau</i>	Th. VII, No. 4, 1977
Muranto, Ryo R. B	<i>Mayarakat Islam</i>	Th. X, No. 1-2, 1980
Nugroho, Agus, A	<i>Ideologi sebagai -----</i>	Th. VI, No. 3, 1976
Paul, W	<i>Keadilan dalam Pelaksanaan Hakam</i>	Th. I, No. 1, 1971
Prasno, Wahyu	<i>Utilitarianisme dan Masalah Keadilan</i>	Th. VI, No. 2, 1976
Priyoso, Harry	<i>Teori Keadilan John Rawls</i>	Th. XII, No. 4, 1981
Prohko, Maharsono	<i>Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah</i>	Th. XII, No. 1, 1980
Perba, Chris J. F	<i>Teknologi Kita: Masalah Legitimasi Teknokrasi?</i>	Th. XII, No. 1, 1980
Rodikus (ini)	<i>Kekerasan dalam Ordo Dunia Modern</i>	Th. XV, No. 3-4, 1985
Sandy, M	<i>Agama dan Integrasi Nasional</i>	Th. VIII, No. 1, 1978
Siswandi, Frans	<i>Mayoritas Terbuka dan Lawan-lawannya</i>	Th. VI, No. 1, 1976
Subagio, Bambang	<i>Terrorisme: Fenomena Politik Abad Ini</i>	Th. XV, No. 3-4, 1985
Sudarminto, Y. B	<i>Relungan antara Agama dan Ideologi</i>	Th. XIII, No. 2, 1983
Subartana, M	<i>Korporasi Internasional</i>	Th. I, No. 3, 1971
Tambunan, Rusbri	<i>Paham Kepemimpinan dalam Kehidupan Sosial</i>	Th. IX, No. 1, 1979
Wartaya, Y	<i>Keadilan Sosial: Antara Teori Pembertan Hal dan Teori Distribusi</i>	Th. XV, No. 1, 1985
Widyarsono, A	<i>Paham Negara Rasional Hegel dalam Filsafat Hukumnya</i>	Th. VIII, No. 3, 1991/2
Windha, Marsana T	<i>Kekerasan, Etika dan Perdamaian</i>	Th. XV, No. 3-4, 1985

2. HUMANISME

Adisasilo, A	<i>Manusia yang Bermasyarakat</i>	Th. III, No. 4, 1973
Bagus, Lorens	<i>Kebernanaan sebagai Hakikat Manusia</i>	Th. II, No. 1, 1972
Bast, Paul S	<i>Man Scheler: Kehidupan Manusia</i>	Th. VII, No. 3, 1977
Ciptasurwama, S	<i>Mengenal Filsafat Kierkegaard</i>	Th. VIII, No. 1, 1978
Djauadi, Irwan	<i>Seni Manusia</i>	Th. VIII, No. 3, 1978
Diharja, Prapta I	<i>Etika Humanis dan Seni Hidup</i>	Th. VII, No. 3, 1977

Fridolin, Iwan	<i>Manusia dan Kematian I</i>	Th. IV, No. 3, 1974
Handriyanta, I	<i>Jiwa sebagai Salah Satu Pandangan tentang Manusia</i>	Th. VI, No. 4, 1976
Harriusanto	<i>Arti Kebebasan</i>	Th. VII, No. 4, 1977
Inocentio, Jose P	<i>Mengintip Misteri di Balik Kematian</i>	Th. XVII, No. 2, 1990
Karman, Yengki	<i>Kematian dan Keputusan Final</i>	Th. XVII, No. 2, 1990
Kemat, Sarta B	<i>Joseph V. Kopp: Teilhard de Chardin Simbol Baru tentang Evolusi</i>	Th. VIII, No. 2, 1978
Kiwan, Paulus	<i>Berpikir</i>	Th. III, No. 1-2, 1973
Kuntara, W., Iga	<i>Pandangan tentang Manusia dalam Serat Wedatama</i>	Th. I, No. 1, 1971
Lasly, Louis	<i>Kematian dan Konsekrasiakutanya</i>	Th. XVII, No. 2, 1990
Mariano, Riyo R.B	<i>Tahap-tahap Kesadaran Moral menurut Kohlberg dan Sikap Moral</i>	
Nugroho, Agus, A	<i>Pandangan tentang Manusia dalam Alam Pikiran Islam</i>	Th. VI, No. 4, 1976
Padmawardaya, Al	<i>Manusia dan Cinta</i>	Th. IV, No. 3, 1974
Pawirandjo, A	<i>Karya dan Kebebasan Manusia</i>	Th. III, No. 3, 1973
Pawiro, Wahono	<i>Sebuah Model Manusia menurut Albert Camus</i>	Th. VI, No. 4, 1976
Prihadi Wibowo, W	<i>Misteri Kematian</i>	Th. XVII, No. 2, 1990
Putraita, C. B	<i>Privasi dan Komunitas Kembali kepada Manusia: Suatu Pandangan Ludwig Feuerbach</i>	Th. III, No. 4, 1973
Sardja, Th	<i>Ramah sebagai Pasi Pembinaan Sikap Sosial</i>	Th. IV, No. 3, 1974
Sarjiwani, Kipanto	<i>Kebebasan menurut Sartre</i>	Th. I, No. 3, 1971
Semerman, T	<i>Pokok-pokok Eksistensialisme</i>	Th. XI, No. 1, 1981
Sardy, M	<i>Fenomenologi Intersubjektivitas</i>	Th. VII, No. 3, 1977
Saputra, Widyahadi	<i>Filosof Jawa Ibn Sina</i>	Th. VIII, No. 2, 1978
Sinaradi, Frans	<i>Manusia, Alam dan Masa Depan</i>	Th. VIII, No. 3, 1978
Suharninto, I	<i>Sebuah Refleksi atas Manusia sebagai Privasi Manusia dan Semuanya</i>	Th. V, No. 3, 1975
Sudiarja, A	<i>Martin Buber: Aku dan Engkau</i>	Th. III, No. 4, 1973
Sutrisna, Mudji F.X	<i>Phenomenologi dan Manusia</i>	Th. IV, No. 3, 1974
Sumardi, Sandjawan	<i>Kebebasan untuk Berkreasi</i>	Th. V, No. 4, 1975
Sumardi, Si	<i>Konsep Evolusi menurut Aurobindo Becfilasat menurut Heidegger Eksistensi Sentimen dalam Kerjasama</i>	Th. XII, No. 1, 1981
Tantridharma, F		Th. XIII, No. 4, 1983
Utama, Madya I	<i>Becfilasat menurut Heidegger</i>	Th. XIV, No. 1, 1984
Utama, Sarjana H	<i>Kebebasan untuk Berada Margaret Mead: Jarak Pemisah antar Generasi Ketanya dengan Pendidikan Moral</i>	Th. I, No. 2, 1971
Vitalis, N		Th. VII, No. 3, 1977
Wibowo, I. G	<i>Eksistensi dan Kematian</i>	Th. IX, No. 1, 1979
Wijana, P	<i>Eksistensialisme dan Pandangannya tentang Manusia Modern</i>	Th. X, No. 3, 1980
		Th. III, No. 4, 1973
		Th. IV, No. 3, 1974
		Th. I, No. 1, 1971

3. SENI-BUDAYA

Hariyadi, Mathias	<i>Kebudayaan: Hasil Desakalisasi Libido</i>	Th. XII, No. 2, 1982
-------------------	--	----------------------

4. EPISTEMOLOGI-FILSAFAT BARAT

Hormaya, Th	<i>Descartes dengan Filosofinya dan Rasionalisme Abad XVII</i>	Th. II, No. 1, 1972
Prawirandjo	<i>Beberapa Catatan tentang Kasa</i>	Th. III, No. 1-2, 1973
Suallo, F	<i>Syllogisme dan Teori Himpunan</i>	Th. III, No. 1-2, 1973
Padmawardaya, A	<i>Teori Pengetahuan menurut Plato</i>	Th. III, No. 3, 1973

Sirihwanata	<i>Cara Kerja Descartes</i>	Th. III, No. 3, 1973
	<i>Dua Teori Aquinas tentang Kebenaran</i>	Th. IV, No. 4, 1974
	<i>Catatan-catatan tentang Aquinas</i>	Th. IV, No. 4, 1974
Widjaja, Soedilo A.	<i>Dua-dua Pengetahuan menurut Michel Foucault</i>	Th. III, No. 3, 1973
Kim	<i>Dua Pola Klarifikasi</i>	Th. III, No. 4, 1973
	<i>Morre dalam Sejarah Filsafat di Inggris</i>	Th. IV, No. 3, 1974
	<i>Terjemahan dan Kapasan Fregeologi Bab 2, 3, 4</i>	Th. IV, No. 4, 1974
Somadia	<i>Pendekatan Simiah</i>	Th. IV, No. 1, 1974
Suryandharma, B. S.	<i>Lesah Kebenaran Manusia</i>	Th. IV, No. 1, 1974
Prasetyo, Mardi	<i>Beberapa Eksklusivitas dan Inklusivitas</i>	
	<i>Sikap-sikap Epistemologi</i>	Th. IV, No. 2, 1974
Adisusilo, A.	<i>Hubungan Subyek dan Objek Sejarah</i>	Th. IV, No. 2, 1974
Soedilo, F.	<i>Arti dan Referen menurut Frege</i>	Th. IV, No. 2, 1974
Suparno, P.	<i>Arti dan Referen menurut Russell</i>	Th. IV, No. 2, 1974
Sosmanio D. S.	<i>Jalan Pertama dari Lima Jalan Thomas Aquinas</i>	Th. IV, No. 4, 1974
Soedarja, A.	<i>Immanuel Kant: Mencari Dasar</i>	
	<i>Dua Pengetahuan yang Lebih Kritis</i>	Th. V, No. 3, 1975
Wibowo	<i>Teori dan Praktek</i>	Th. VI, No. 1, 1976
Murti, Wiana, F. X.	<i>William James: Latar Belakang Sejarah</i>	
	<i>dan Sambungannya</i>	Th. VI, No. 3, 1976
Sutrisna, Mufji F.X.	<i>Pragmatisme</i>	Th. VI, No. 3, 1976
Soedarja, A. dan		
Hastaprasana	<i>Benar-benar: Itinerarium Mentis Deum</i>	Th. VI, No. 4, 1976
Mardikartono, S. JB	<i>Descartes dan Freud</i>	Th. VIII, No. 3, 1978
Bagan, Rikard	<i>Kepercayaan Filsafat menurut Karl Jaspers</i>	Th. IX, No. 3-3, 1979
Inocentio, Inao	<i>Filsafat Alam dalam Pemikir-pemikir Islam</i>	
	<i>Abad Pertengahan</i>	Th. X, No. 1-2, 1980
Tjong, Roy	<i>Menyeri Logika</i>	Th. XI, No. 1, 1981
Rudiyanto	<i>Menelusuri Filsafat Sosial</i>	Th. XI, No. 2-3, 1981
Prasetyuhadi	<i>Beberapa Pemikiran Awal dalam Hermeneutika</i>	Th. XIV, No. 1, 1984
Cahyadi, Hari	<i>Memperpadakan Refleksi Kritis sebagai Dasar</i>	
	<i>Kritik Ideologi Teori Kritis</i>	Th. XIV, No. 1, 1984
Hardiman, Budi P.	<i>Mengungkap Gerakan Kiri Baru</i>	Th. XIV, No. 1, 1984

SURAT REDAKSI

Di akhir Edisi tahun XVIII, staf Majalah menyampaikan banyak terimakasih atas perhatian dari para pembaca dan pelanggan. Terlebih, bagi semua pihak yang telah memberikan jawaban Questioner Driyarkara pada edisi no.3 yang lalu. Semakin nyata bahwa banyak pihak yang turut memperhatikan perjalanan majalah hingga tahun ke-18. Sebagai timbal baliknya, pada edisi no.1 tahun XIX mendatang akan kami sajikan Resume semua jawaban Questioner.

Melalui surat ini pun, kami sampaikan beberapa hal kepada para pelanggan dan pembaca majalah. Sudah mulai dari edisi no.3 tahun XVIII harga majalah naik. Biaya langganan per tahun menjadi Rp 7.500 dan harga eceran majalah menjadi Rp 2.000. Kami bersyukur bahwa hal ini pun disinggung dalam jawaban Questioner. Dan sebagian besar menyatakan tidak keberatan. Tentu semua ini kami sadari demi keberlangsungan hubungan majalah Driyarkara dengan para pembacanya.

Selubungan dengan kenaikan biaya majalah, kami sampaikan pula bahwa mulai awal edisi tahun XIX staf administrasi majalah mengadakan pembenahan dan pemutihan daftar para pelanggan. Karena terjadi kesimpang-siuran daftar pembayaran maka pembenahan hanya dilakukan untuk administrasi keuangan terhitung mulai edisi no.1 tahun XVIII. Proses pemutihan berlangsung hingga menjelang edisi no.2 tahun XIX, bulan Desember 1992. Kami berharap majalah Driyarkara pun menjadi "milik" para pembacanya, dan secara objektif salah satunya dari kesetiaan pembayaran biaya langganan. Pembenahan administrasi kami mulai dengan melakukan penagihan biaya langganan baik bagi yang sama sekali belum membayar sejak edisi no.1 tahun XVIII atau bagi yang belum melunasinya.

Visi Majalah Driyarkara adalah melayani kebutuhan intelektual dari segi pemikiran filsafati. Salah satu upaya mewujudkan visi tersebut kini kami rintis melalui "kiat" menampilkan daftar referensi seluruh edisi majalah sampai edisi Tahun XVIII secara tematis. Tidak sekaligus kami sajikan, tapi secara bertahap terhitung mulai edisi no.4 tahun XVIII ini. Kiat ini kami rintis dalam rangka menyusun Bunga Rampai karangan-karangan pilihan majalah Driyarkara selama 18 tahun. Bagi para pembaca yang tertarik dan mendorong mengusulkan salah satu karangan, dapat menyampaikannya pada redaksi.

Pada akhirnya kami semakin yakin, hanyalah kontak dan dialog terus menerus dengan para pembaca majalah Driyarkara yang dapat membuat majalah ini menjadi milik banyak orang. Dan besar harapan kami, surat ini dapat semakin memperat jalinan batin para pembaca dengan majalah Driyarkara.